

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1 Penjelasan Umum**

##### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Provinsi Sulawesi Barat di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia Tanggal 22 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2002 Tanggal 18 September 2002, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 tahun 2000 Tanggal 10 maret 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 12/KPTS/DPRD/VI/2000 Tanggal 19 Juni 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 42/KPTS/DPRD/2000 Tanggal 6 Oktober 2000, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 26/KPTS/DPRD-Mamasa/2003 tanggal 27 Desember 2003, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor IST/KPTS/DPRD Mamuju Utara/2004 Tanggal 23 Agustus 2004.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 ini pula, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pengisian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat tersebut didasari dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.56-1028 Tahun 2005 Tanggal 25 November 2005 dan telah diambil sumpah/janjinya pada tanggal 7 Desember 2005.

Dengan selesainya pengisian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan pemilihan Pimpinan DPRD tersebut merupakan tonggak sejarah baru bagi Provinsi ini karena telah mempunyai lembaga perwakilan rakyat yang permanen, utuh dan refresentatif yang antinya diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, menjadi mitra sejajar pemerintah daerah.

Pada awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mamasa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 berubah nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara.

Pada tahun 2017 Salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 28 Desember 2017 telah mengalami perubahan nama menjadi Kabupaten Pasangkayu. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan melalui Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2017 Pada tanggal 28 Desember 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten di Sulawesi Barat.

#### **b. Data Geografis Wilayah**

Secara Geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi geografis 0°12' - 3°38' Lintang Selatan dan 118°43'15" - 119°54'3" Bujur Timur (Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejarah terbentuknya Sulawesi Barat bertolak dari semangat "*Allamungan Batu di Luyo*" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "*Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu*" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "*Sipamandar*" (saling memperkuat). Dengan semangat "*Sipamandar*" dan perjuangan yang panjang dari seluruh unsur masyarakat mandar serta dukungan pemerintah maka lahirlah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang menjadi awal sejarah pembentukan Provinsi yang ke-33 di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota di Mamuju.

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang pemerintahan, di mana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju,

sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, dengan letak geografis sebagai berikut:

1. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju, terletak pada posisi 2°8'7" - 2°57'50" LS dan 117°3'57" - 119°51'17" BT.
2. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene, terletak pada posisi 2°38'45" - 3°38'15" LS dan 118°45'00" - 119°4'45" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143 Km.
3. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali, terletak pada posisi 3°4'10" - 3°32'00" LS dan 118°40'27" - 119°29'41" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km.
4. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa, terletak pada posisi 2°39'216" - 3°19'288" LS dan 119°0'216" - 119°38'144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km.
5. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu, terletak pada posisi 0°40'10" - 1°50'12" LS dan 119°25'26" - 119°50'20" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km.
6. Kabupaten Mamuju Tengah dengan Ibu Kota Tobadak, terletak pada posisi 1°43'33" - 2°18'54" LS dan 119°7'35" - 119°52'18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km.

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Menurut Kabupaten**  
**di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

NO	KABUPATEN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	PERSENTASE TERHADAP LUAS SULAWESI BARAT
1.	Majene	947,84	5,65
2.	Polewali Mandar	1.775,65	10,58
3.	Mamasa	3.005,88	17,91
4.	Mamuju	4.999,69	29,78
5.	Pasangkayu	3.043,75	18,13
6.	Mamuju Tengah	3.014,37	17,96
<b>TOTAL (SULAWESI BARAT)</b>		<b>16 787,18</b>	<b>100,00</b>

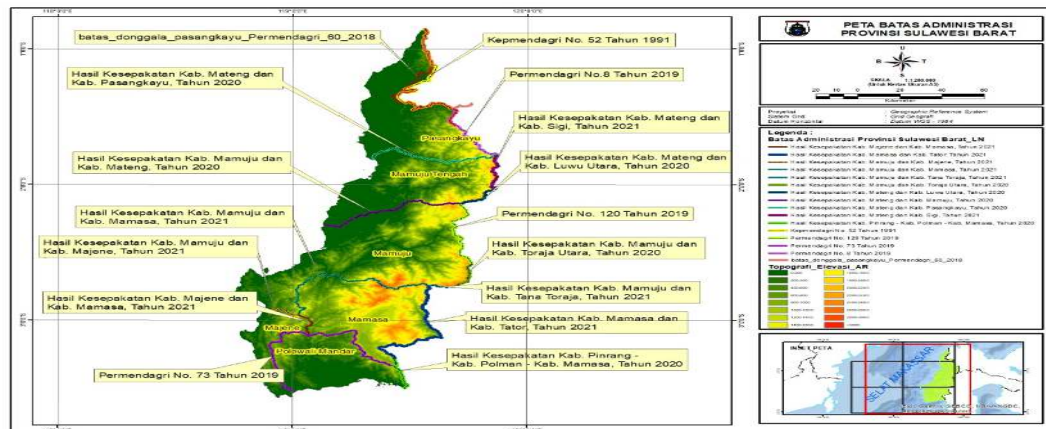
*Sumber : BPS, Sulawesi Barat Dalam Angka 2023*

#### a) Luas Wilayah

Secara administratif, wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 Km<sup>2</sup> (Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2022) dan terbagi ke dalam 6 kabupaten, meliputi 69 Kecamatan, 575 Desa dan 71 Kelurahan. Kabupaten terluas adalah Mamuju dengan luas wilayah sebesar 4 999,69 Km<sup>2</sup> (29,78%) terhadap luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat) dan yang terkecil adalah kabupaten Majene dengan luas wilayah sebesar 947,84 Km<sup>2</sup> (5,65%) dari

wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat secara jelas dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini :

**Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat**

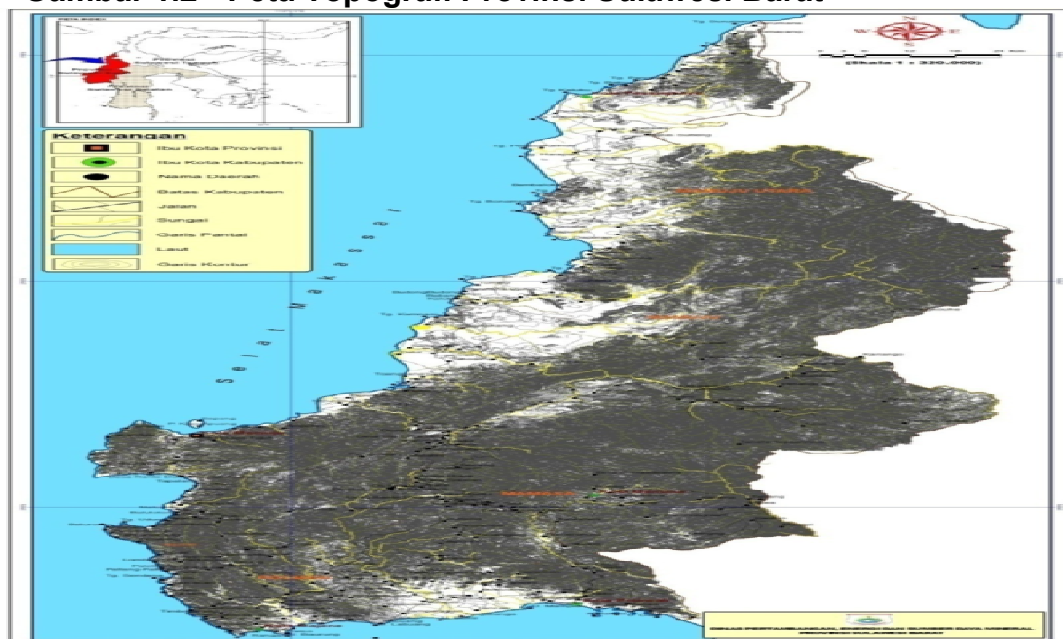


Sumber: Dinas PUPR Prov. Sulbar, 2023

## b) Keadaan Topografi

Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervariasi, dari dataran, berbukit sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan.

**Gambar 1.2 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat**



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di Beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut**  
**Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Jumlah Gunung	Nama Gunung Tertinggi	Ketinggian Gunung (meter)
Majene	11	Seteng	1 001
Mamuju Tengah	-	-	-
Polewali Mandar	28	Tetuh	1 448
Mamasa	31	Mambuliling	2 873
Mamuju	109	Gandang Dewata	3 037
Pasangkayu	14	Pandabatu	284

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat*

### c) Geologi

Geologi di Provinsi Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuartar. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasangkayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) dibagian timur memanjang utara-selatan Wilayah Sulawesi Barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur Wilayah Mamuju dan Mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah-Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah Pasangkayu formasi Latimojong di tindih tidak selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi

bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi Lamasi menindih tidak selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir. Miosen Awal, yang merupakan Batuan gunung api beranggotakan Batu Gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari Batu Gamping Napal.

Formasi Riu berumur Miosen Awal-Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung Api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan

lava yang tersusun oleh andesit-basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah-Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunung api Talaya. Batuan Gunung api Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit-basal. Batuan ini mempunyai Anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit-basal.

Sedangkan Pada bagian Barat wilayah Kab. Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batu pasir dan batulempung. Batuan berumur Miosen Tengah-Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidakselarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, tempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur formasi ini adalah Pliosene dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat.

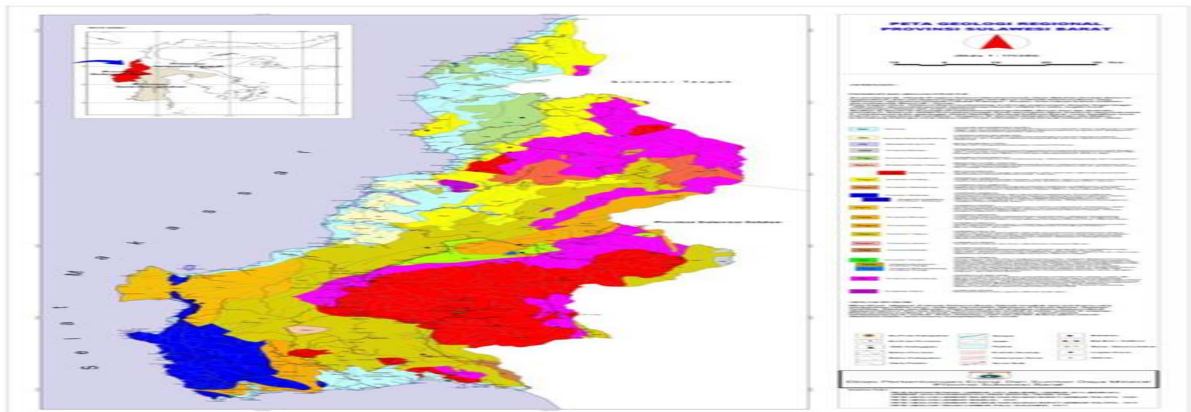
Batuan Gunung api Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batu pasir gampingan, napal tufaan dan batu gamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batugamping koral, batu gamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batu pasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir-Pliosen Awal.

Pada bagian timur wilayah Provinsi Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. Ke arah tenggara wilayah Mamasa, batumannya didominasi oleh batuan epiklastik gunung api Formasi Loka (Tml).

Formasi ini terdiri atas batu pasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah-Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmpv) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Di wilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen.

Sedangkan di bagian Barat wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya disusun oleh endapan sedimenter di mana di wilayah Mamuju tersingkap Formasi Budong-budong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batu pasir, batulempung dan batugamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan-endapan sungai, pantai dan antar gunung. Sedangkan wilayah Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batu pasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah-Pliosen. Proses tektonik yang pernah terjadi wilayah Provinsi Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tektonik yang berbeda juga menyebabkan lipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

**Gambar 1.3**  
**Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat**



Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala Sulawesi Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan flysch Formasi Latimojong (Kls). Secara umum Formasi ini mengalami pemalihan lemah-sedang; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas. Umur formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dan diendapkan pada lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi tiga kelompok tektonik yaitu:

- (a) Fold belt aktif di mana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar hingga ke selat Makassar
- (b) Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basement, paparan karbonat dan batuan sedimen klastik yang berumur oligo-eosen, sub marin vulkanik yang berumur Miosen.
- (c) Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur-Paleogen.

Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batulempung, batubara, batu pasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial.



Di atas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batugamping berumur Eosen. Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah (rifting) dari Kalimantan.

Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Di atas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan. Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut di mana materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistosen dan didominasi oleh konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan foreland pada saat orogenesis ke arah timur.

#### **d) Hidrologi**

Sejumlah sungai yang tergolong besar mengalir wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dengan jumlah aliran terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 (dua) sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing-masing sekitar 150 km.

**Tabel 1.3**  
**Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai**  
**di Sulawesi Barat Tahun 2023**

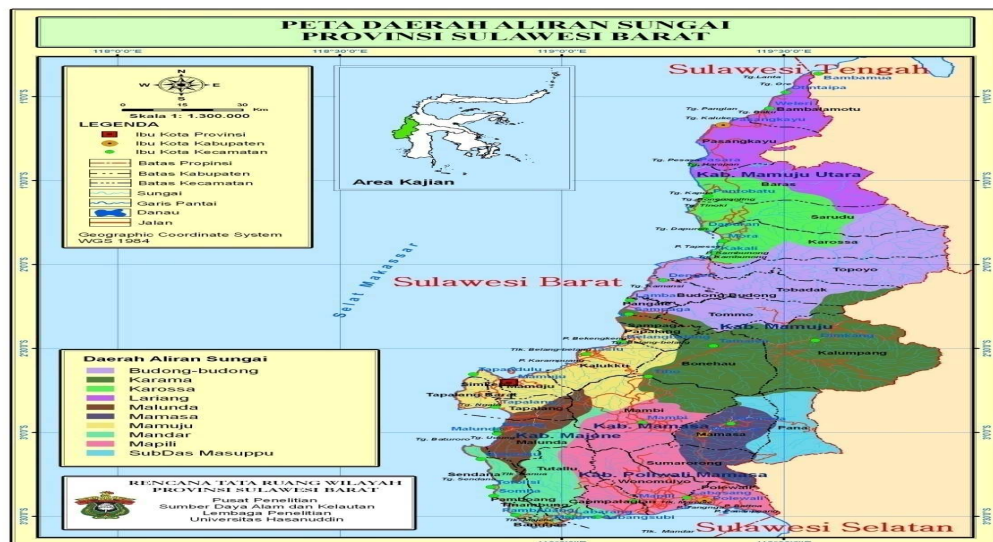
<b>NAMA SUNGAI</b>	<b>PANJANG (KM)</b>	<b>LOKASI</b>
Saddang	150	Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar
Matakali	28	Polewali Mandar
Mambi	95	Polewali Mandar

Mandar	90	Polewali Mandar
Manyamba	28	Majene
Malunda	38	Majene
Kaluku	32	Mamuju, Polewali Mandar
Karama	150	Mamuju

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat merupakan ekosistem dengan tingkat kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Provinsi Sulawesi Barat dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan tinggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara, wilayah-wilayah dengan topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar. Karena itu, ekosistem dan daya dukung wilayah datar ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya. Berdasarkan itu, mudah dipahami bahwa arahan pengembangan ekologi DAS perlu dirancang dengan baik.

**Gambar 1.4**  
**Peta Daerah Aliran Sungai**  
**di Provinsi Sulawesi Barat**



Sumber : RTRW Prov. Sulbar 2014-2034

Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumber daya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. Pengembangan ekologi DAS harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

**Tabel 1.4**  
**Kebijakan Pengelolaan DAS-DAS Utama**  
**di Sulawesi Barat**

Nama DAS atau Kelompok DAS	Luas DAS (ha)	Areal kritis (ha)	Ekstensi kekritisasi (% areal)	Frekuensi banjir di hilir	Fungsi dan peran DAS								Arahan kebijakan		
					PLTA (MW)	Irigasi	Air baku	Pert. & perkeb.	Wallacea Ecoregion	Ecotourism	Keragaman ekosistem	Stabilisasi ekosistem	Konservasi	Preservasi	Urutan prioritas
Budong-Budong/Topoyo	326.579	65.756	20,1	Tinggi, pengaruhi jalan negara	124	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Karama	344.899	84.659	24,5	Tinggi	115++	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Karossa/Benggaulu	151.395	10.024	6,6	Sedang	✓	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	II
Lariang/Pasangkayu	167.587	11.688	7,0	Sedang	✓	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Potensial	Sgt tinggi	Sgt penting	✓	✓	II
Malunda	67.767	1.549	2,3	Sedang	✗	✗	Kecil	Sedang	Penting	Potensial	Sedang	Penting		✓	III
Mamasa	89.106	13.872	15,6	Wil.hulu DAS	✓	✗	Besar	Sedang	Penting	Sgt potensial	Tinggi	Sgt penting	✓		II
Mamuju	149.487	67.067	44,9	Sedang	✗	✗	Besar	Sedang	Sgt penting	Sgt potensial	Tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Mandar	93.462	36.656	39,2	Sedang	✗	✗	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Sedang	Penting	✓		III
Mapilli	229.644	77.983	34,0	Tinggi	174	✓	Besar	Besar	Sgt penting	Sgt potensial	Tinggi	Sgt penting	✓	✓	I
Saddang (hulu)	71.856	19.448	27,1	Wil.hulu DAS	✗	✓	Kecil	Kecil	Penting	Potensial	Tinggi	Sgt penting	✓		III
<b>Total</b>	<b>1.691.780</b>	<b>388.702</b>	<b>23,0</b>												

Sumber : Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa DAS yang memiliki persentase wilayah kritis terbanyak adalah Mamuju sebesar 44,9 persen dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar sebesar 39,2 persen, DAS Mapilli 34 persen dan DAS Saddang 27,1 persen. DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terbesar dengan luas 344.899 ha, juga merupakan DAS dengan persentase lahan kritis yang besar yakni sebesar 24,54 persen dari total wilayah DAS Karama.

**Tabel 1.5**  
**Kondisi Kekritisasi DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat**

DAS	Tdk Kritis (ha)	% DAS	Kritis (ha)	% DAS	Total DAS (ha)	Persen (%)
DAS Budong-Budong	260 823	80	65 756	20	326 579	19,3
DAS Karama	260 240	75	84 659	25	344 899	20,4
DAS Karossa	141 362	93	10 024	7	151 386	8,9
DAS Lariang	155 897	93	11 688	7	167 585	9,9
DAS Malunda	66 218	98	1 549	2	67 767	4,0
DAS Mamasa	75 234	84	13 872	16	89 106	5,3
DAS Mamuju	82 415	55	67 066	45	149 481	8,8
DAS Mandar	56 772	61	36 656	39	93 428	5,5
DAS Mapilli	151 659	66	77 983	34	229 643	13,6
DAS Saddang	52 401	73	19 448	27	71 850	4,2
<b>Grand Total</b>	<b>1 303 022</b>	<b>77</b>	<b>388 701</b>	<b>23</b>	<b>1 691 723</b>	<b>100,0</b>

Sumber : Materi Teknis RTRW Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

Pengembangan DAS ke depan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan prioritas yang mengacu pada pengendalian lahan kritis dengan kegiatan seperti reboisasi, Penghijauan, Pembinaan pertanian berbasis konservasi, penggalangan parti-sipasi masyarakat dalam perhutanan desa. Perlindungan terhadap aktivitas pengrusakan hutan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktivitas penebangan liar, Pengetatan pemberian izin bagi masyarakat atau instansi yang akan mengelola kawasan hutan. DAS DAS yang perlu mendapat prioritas adalah Karama, Mamuju, Budong-Budong, Karossa dan Mapilli yang memiliki tingkat kekritisian yang besar.

#### **e) Klimatologi**

Iklim di wilayah Provinsi Sulawesi Barat umumnya tropis karena dilalui juga garis khatulistiwa serta mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Sebagai daerah yang memiliki pinggiran pantai, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, maka Provinsi Sulawesi Barat memiliki pola suhu udara yang bergantung kepada musim angin laut. Pada tahun 2023 suhu udara di Provinsi Sulawesi Barat berkisar antara 20,40°C hingga 34,10°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,70°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 48,00 persen sampai dengan 81,50 persen. Pemantauan suhu udara di Provinsi Sulawesi Barat, terpantau oleh Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di Kabupaten Majene.

**Tabel 1.6**  
**Keadaan Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan**  
**di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

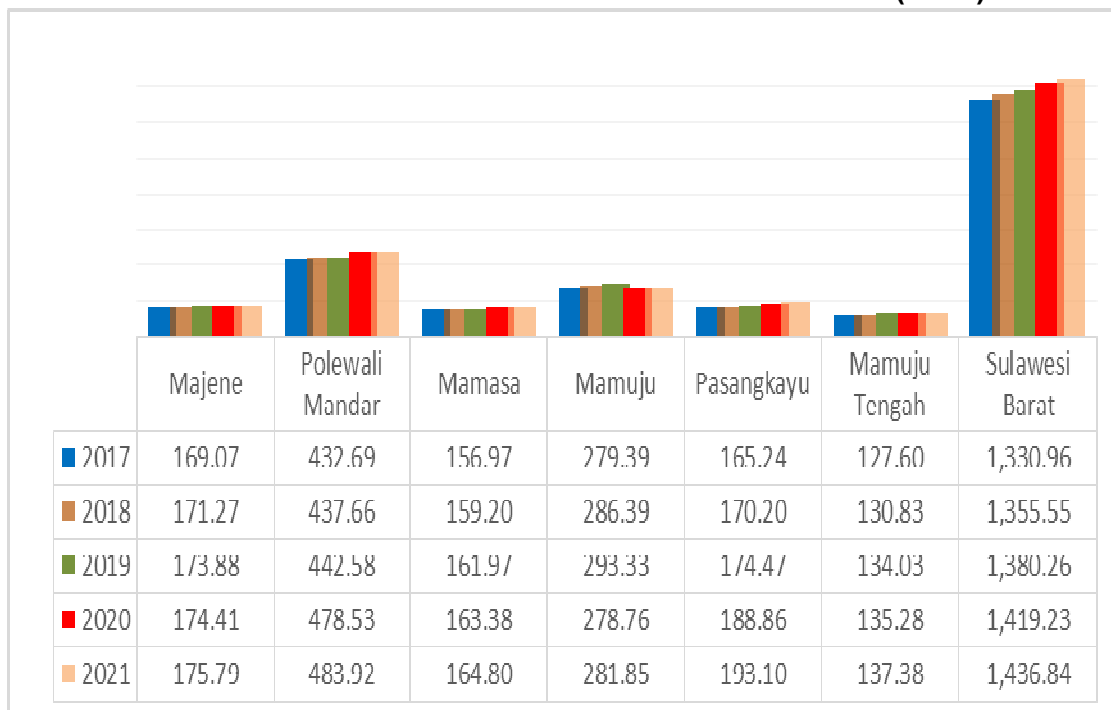
Bulan	Suhu Udara (°C)			Rata-rata Kelembaban Udara (%)
	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	
Januari	21,40	27,10	33,00	82,80
Februari	22,40	27,70	33,80	81,10
Maret	23,00	27,50	33,00	80,90
April	23,20	28,10	33,20	79,60
Mei	22,20	28,40	32,80	80,60
Juni	22,90	27,70	32,80	82,10
Juli	20,40	27,50	31,80	81,00
Agustus	23,40	27,70	31,80	81,00
September	23,40	27,70	33,80	80,60
Oktober	23,20	27,90	33,20	83,10
November	21,80	27,50	33,90	83,90
Desember	23,00	27,40	34,10	82,30

*Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023*

### **c. Jumlah Penduduk**

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data BPS yang berasal dari proyeksi Penduduk tahun 2022 Provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 1.436.842 dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 728.865 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 707.977 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,95 artinya terdapat sekitar 103 laki laki untuk setiap 100 perempuan.

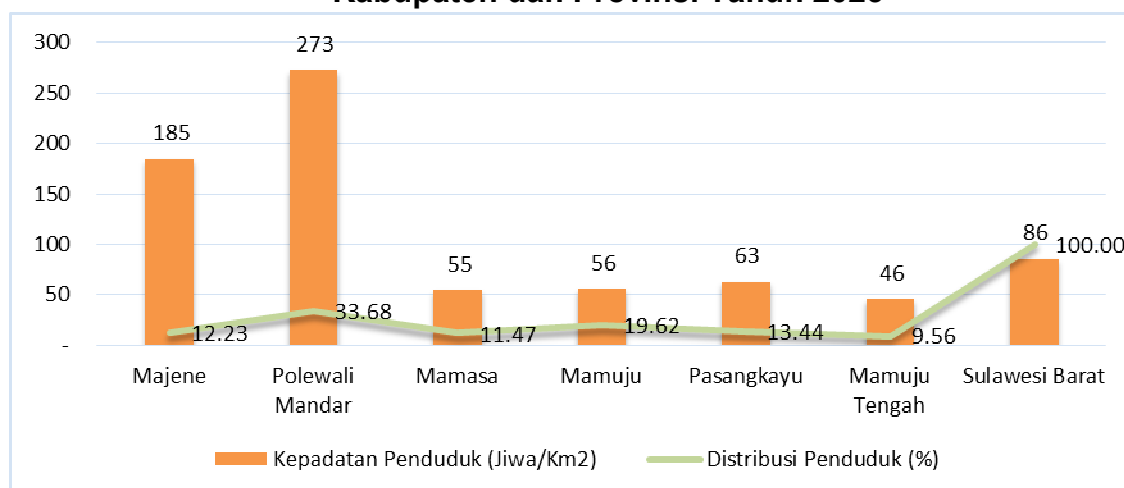
**Grafik 1.1**  
**Jumlah Penduduk Sulawesi Barat Tahun 2018-2023 (Ribuan)**



Sumber: BPS, Hasil SP 2023

Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,67 persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,56 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 237 jiwa/km<sup>2</sup>, selanjutnya Kabupaten Majene sebesar 185 jiwa/km<sup>2</sup>, Kabupaten Pasangkayu 63 jiwa/km<sup>2</sup>, Kabupaten Mamuju dengan kepadatan 56 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kabupaten Mamasa dengan kepadatan sebesar 55 jiwa/km<sup>2</sup>, serta terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 46 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2022.

**Grafik 1.2**  
**Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut**  
**Kabupaten dan Provinsi Tahun 2023**



Sumber: BPS, Hasil SP2020, Proyeksi

Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 84,13 persen dari total penduduk, kemudian Kristen Protestan sebesar 13,40 persen serta agama yang minoritas yaitu Katolik, Budha dan Hindu dengan jumlahnya di bawah rata-rata dua persen. Adapun gambaran persentase penduduk menurut Kabupaten dan Agama seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.7**  
**Persentase Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten**  
**di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kabupaten	Persentase Penduduk					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Majene	99,85	0,09	0,04	0,00	0,01	0
Polewali Mandar	98,48	1,17	0,32	0,02	0,02	0
Mamasa	17,64	77,67	3,16	1,52	0,00	0
Mamuju	85,23	13,09	0,68	0,97	0,04	0
Pasangkayu	86,50	7,10	1,96	4,43	0,01	0
Mamuju Tengah	83,93	9,35	2,41	4,18	0,13	0
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>84,13</b>	<b>13,40</b>	<b>1,09</b>	<b>1,36</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>

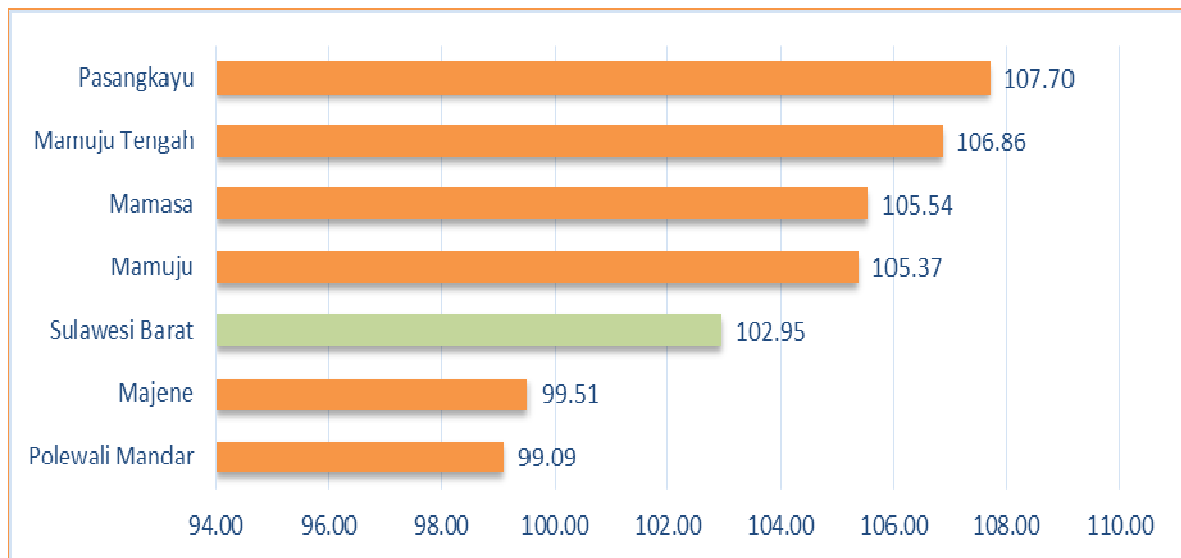
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

a) Rasio Jenis Kelamin

Penduduk di Provinsi Sulawesi didominasi oleh laki-laki di mana perbandingan rasionya sebesar 102,95. Rasio jenis kelamin tiap kabupaten juga berbeda di mana untuk Kabupaten Polewali Mandar dan Majene mempunyai

rasio jenis kelamin di bawah dari nilai 100 (seratus) sebesar 99,09 persen untuk Kabupaten Polewali Mandar dan 99,51 untuk Kabupaten Majene artinya bahwa untuk setiap seratus penduduk perempuan hanya ada 99 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah rasio terbesar berada di Kabupaten Pasangkayu yang sebesar 107,70 sedangkan untuk kabupaten lainnya dengan nilai rasio lebih besar dari seratus, seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

**Grafik 1.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**



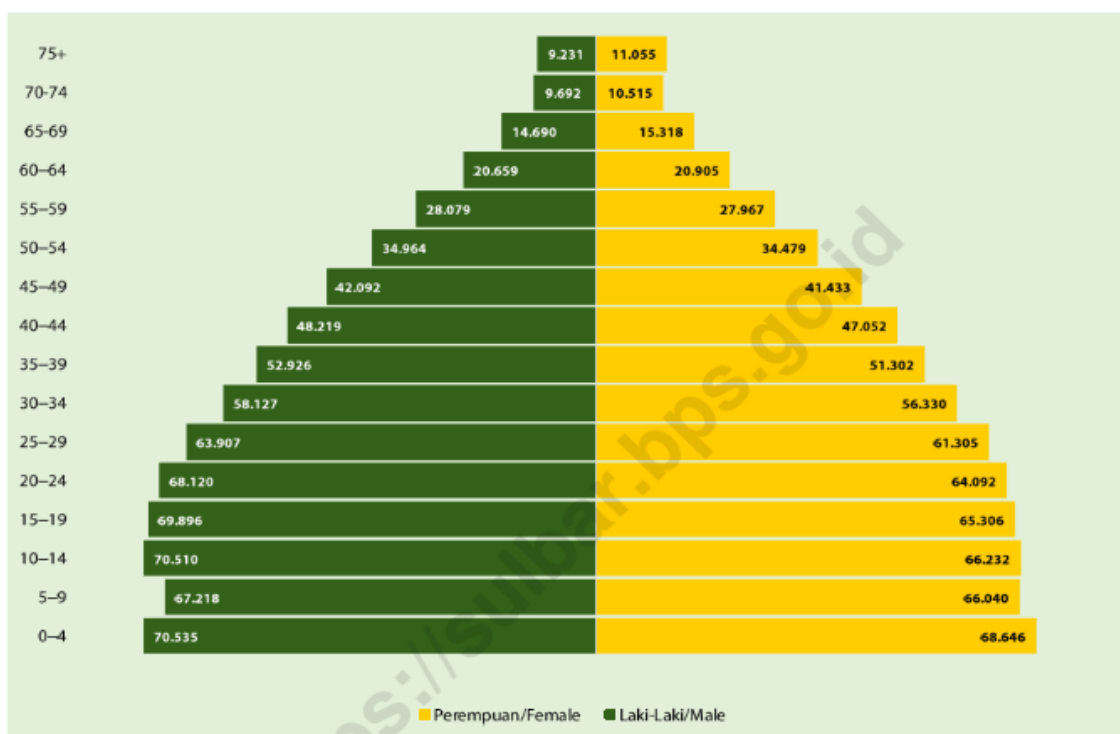
Sumber : DUK Capil Sulbar 2023

#### b) Struktur Usia Penduduk

Struktur Usia penduduk di Provinsi Sulawesi Barat di mana angka terbesar berada pada kelompok usia muda yaitu antara usia 0-49 tahun, hal itu menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk pada usia muda yang cukup tinggi. Jumlah penduduk usia belum produktif antara 0-14 tahun sebesar 409.181 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia produktif antara 15-64 tahun sebesar 1.199.288 jiwa serta jumlah penduduk usia tidak produktif  $\geq 65$  tahun sebanyak 70.501 jiwa. Disamping itu Struktur Usia Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat masih berada pada struktur umur muda di mana persentase penduduk umur muda jauh lebih tinggi dibanding yang berumur tua. Dari piramida penduduk di bawah ini terlihat bahwa bagian dasar dari piramida yang cukup lebar dan bagian puncak yang sempit mencerminkan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif masih tinggi.



**Grafik 1.4**  
**Piramida Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022**



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

**Tabel 1.8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**  
**di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	70.535	68.646	139.181
5 – 9	67.218	66.040	133.258
10 – 14	70.510	66.232	136.742
15 – 19	69.896	65.306	135.202
20 – 24	68.120	64.092	132.212
25 – 29	63.907	61.305	125.212
30 – 34	58.127	56.330	114.457
35 – 39	52.926	51.302	104.228
40 – 44	48.219	47.052	95.271
45 – 49	42.092	41.433	83.525
50 – 54	34.964	34.479	69.443
55 – 59	28.079	27.967	56.046
60 – 64	20.659	20.905	41.564
65 – 69	14.690	15.318	30.008
70 – 74	9.692	10.515	20.207
75+	9.231	11.055	20.286
<b>Jumlah</b>	<b>728.865</b>	<b>707.977</b>	<b>1.436.842</b>

Sumber : DUKAPIL SULBAR 2023

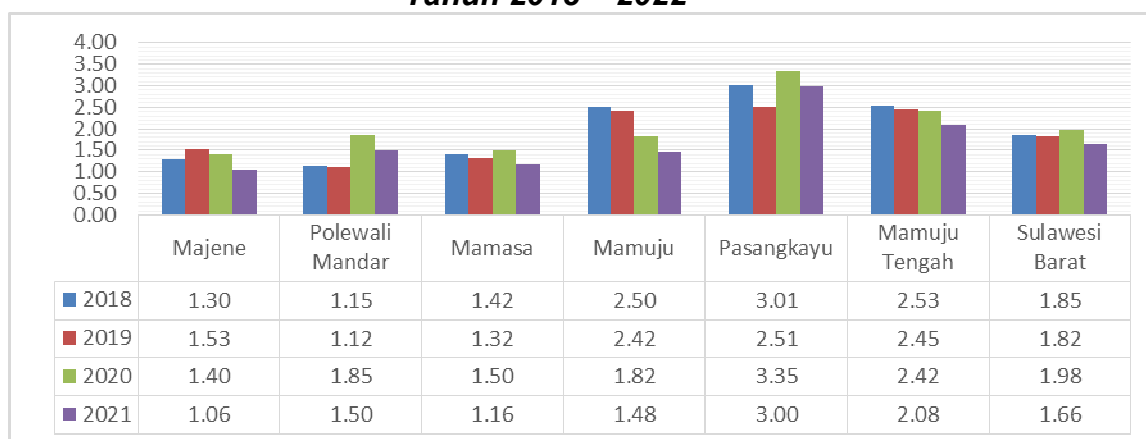
Apabila dilihat dari struktur usia penduduk menurut kelompok umur tahun 2021 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 957.160 jiwa, lebih banyak dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65 + tahun) sebesar 409.181 jiwa. Proporsi penduduk usia 0 – 14 Tahun turun dari 28,90 persen pada tahun 2020 menjadi 28,47 persen pada tahun 2021. Dalam periode yang sama penduduk usia kerja 15 – 64 tahun meningkat dari 59,64 persen menjadi 66,66 persen. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 3,45 persen menjadi 4,90 persen.

Berdasarkan gambaran tersebut struktur umur penduduk Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh generasi milenial (24-39 tahun) sebesar 343.897 jiwa (23,93 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami bonus demografi. Di mana jumlah usia produktif lebih banyak daripada jumlah usia non produktif.

#### c) Pertumbuhan Penduduk

Sebagai salah satu provinsi termuda, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai daya tarik untuk memikat penduduk daerah lainnya berpindah ke Sulawesi Barat, masih terbukanya lahan dan besarnya potensi pengembangan di Provinsi Sulawesi Barat menjadi bagian dari pemicu hal tersebut. Adapun laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,85 persen turun menjadi 1,66 persen pada tahun 2021. Hal ini dapat dijadikan salah satu indikasi keberhasilan program keluarga berencana. Kegiatan keluarga berencana ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga di Sulawesi Barat.

**Grafik 1.5**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat**  
**Tahun 2018 – 2022**



Sumber : DUKCAPIL SULBAR 2023

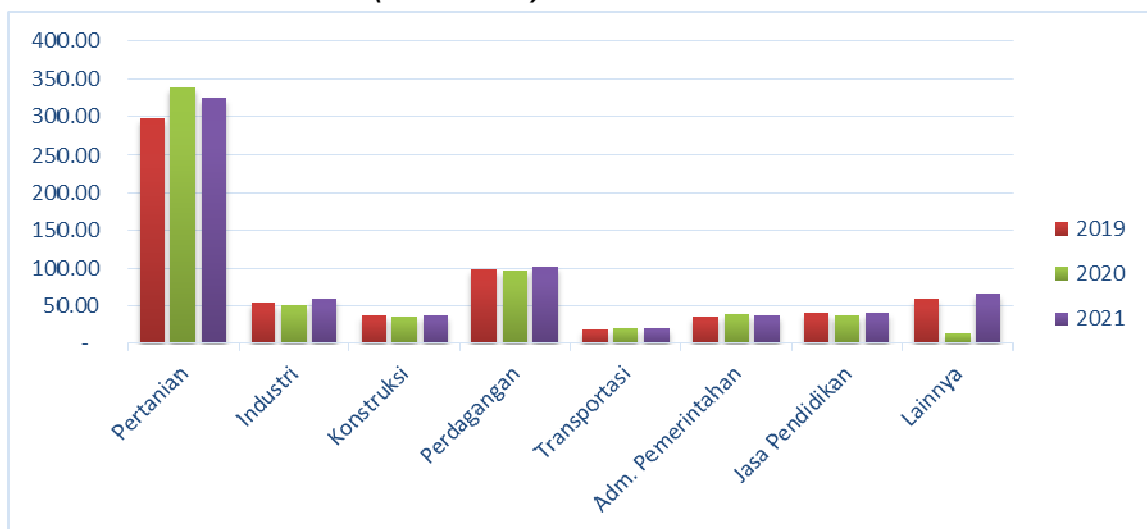
Untuk kategori kabupaten pada tahun 2021 laju pertumbuhan tertinggi

terdapat di Kabupaten Pasangkayu sebesar 3,00 dan Kabupaten Majene dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yaitu sebesar 1,06 persen.

#### d) Lapangan Pekerjaan Utama

Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Tahun 2021, penduduk Sulawesi Barat paling banyak bekerja pada sektor pertanian yaitu sebanyak 324,17 ribu jiwa (47,22 persen), kemudian disusul oleh Sektor Perdagangan sebanyak 102,26 ribu jiwa (14,89 persen) dan Sektor yang paling rendah yaitu transportasi sebanyak 20,65 ribu jiwa (3,01 persen).

**Grafik 1.6 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019-2023 (Ribu Jiwa)**



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022

Selama periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2023, sektor-sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja adalah Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Administrasi Pemerintahan dan Lainnya. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan adalah Sektor Konstruksi dan, Jasa Pendidikan.

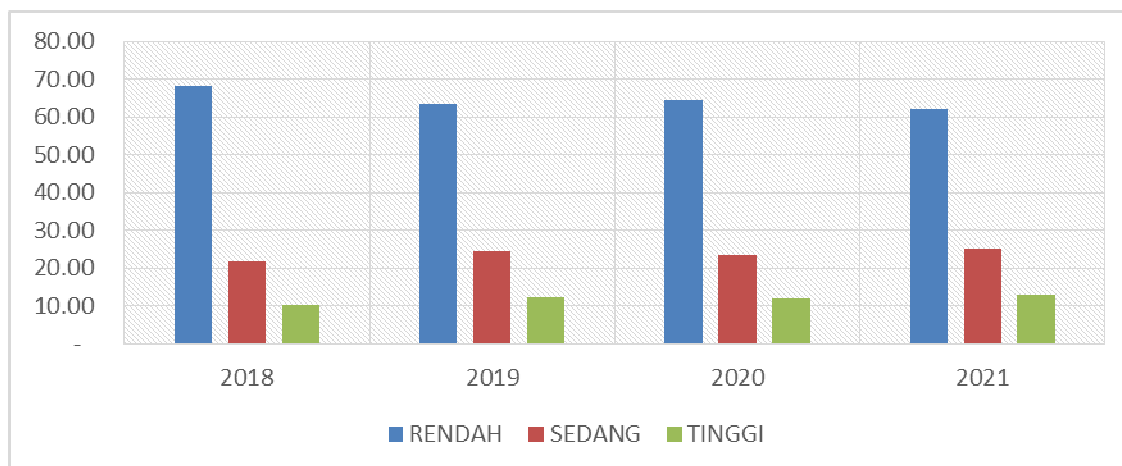
#### e) Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2020, pekerja di Provinsi Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sekitar 425,81 ribu orang (62,02 persen), yang terdiri dari pekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 331,37 ribu orang (48,26 persen) dan pekerja berpendidikan SLTP sebanyak 94,43 ribu orang (13,75 persen). Jumlah pekerja yang berpendidikan menengah pada tahun 2020 sebanyak 172,71 ribu (25,15 persen). Sedangkan pekerja yang berpendidikan tinggi sebanyak 88,02 ribu orang (12,82 persen).

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu

pekerja yang berpendidikan rendah cenderung mengalami penurunan, sementara penduduk yang berpendidikan sedang dan tinggi mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menunjukkan tren positif.

**Grafik 1.7**  
**Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan tahun 2018-2023**



Sumber : DUKCAPIL SULBAR 2023

Pada Tahun 2023, status pekerjaan terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat adalah pekerja buruh/karyawan sebanyak 178,41 ribu atau sekitar 25,98 persen. Kemudian diikuti oleh berusaha dibantu buruh tidak tetap yang mencapai 24,24 persen atau sebanyak 166,46 ribu. Sementara itu pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap adalah pekerjaan dengan porsi terkecil, hanya sebesar 1,21 persen atau sebanyak 8,35 ribu.

**Tabel 1.9**  
**Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2019 – 2023 (Ribu Orang)**

NO	STATUS PEKERJAAN UTAMA	2019	2020	2021	PERSENTASE 2020
1	Berusaha Sendiri	135,39	139,01	149,32	21,74
2	Berusaha di Bantu Buruh tidak Tetap	147,93	159,90	166,46	24,24
3	Berusaha dibantu buruh tetap	11,89	14,59	8,35	1,21
4	Buruh/Karyawan	170,90	169,61	178,41	25,98
5	Pekerja Bebas	53,79	45,51	49,65	7,23
6	Pekerja tak dibayar	121,71	144,37	134,33	19,56
<b>Jumlah</b>		<b>619,39</b>	<b>672,99</b>	<b>686,54</b>	<b>100,00</b>

Sumber : DUKCAPIL SULBAR 2023

#### **d. Jumlah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.**

Pada awal terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mamasa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 berubah nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Utara.

Namun dengan adanya tuntutan otonomi daerah maka dibentuklah Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2017 Salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 28 Desember 2017 telah mengalami perubahan nama menjadi Kabupaten Pasangkayu. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan melalui Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2017 Pada tanggal 28 Desember 2017. Sampai tahun 2021 jumlah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 6 (enam) Kabupaten yakni :

- 1) Kabupaten Mamuju (ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat);
- 2) Kabupaten Majene;
- 3) Kabupaten Polewali Mandar;,,
- 4) Kabupaten Mamasa;
- 5) Kabupaten Pasangkayu dan;
- 6) Kabupaten Mamuju Tengah,

Pada era reformasi yang hingga kini tengah berlangsung di Negara Republik Indonesia telah memberikan harapan dan peluang bagi upaya perubahan dan perbaikan disegala bidang kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah terjadi perubahan yang ditandai dengan pemberian peluang yang semakin besar terhadap peran aktif masyarakat antara lain di bidang penegakan hukum, penghormatan hak-hak asasi manusia dan pemberantasan KKN.

Salah satu perubahan yang paling menonjol dan hingga kini terus diupayakan adalah yang berkenaan dengan cara pandang mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan persoalan politik, kebijakan, sosial ekonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai bentuk kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat tidaklah mengabaikan pentingnya manajemen pemerintahan. Tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan terletak pada

laporan pertanggungjawaban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang disampaikan dalam setiap tahunnya.

Provinsi Sulawesi Barat yang juga merupakan salah satu bagian dari penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat (4) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang di susun dan dilaporkan oleh Provinsi Sulawesi Barat adalah satu bentuk kewajiban pemerintah daerah yang harus dilaksanakan yakni penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 69 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

#### **e. Jumlah Perangkat Daerah**

Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebanyak 42 SKPD yang terdiri atas 25 Dinas 8 Badan, 6 Biro, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektirat dan 1 RSUD, sebagaimana dalam tabel berikut.

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (*drafting and recording data plus information*) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumberdaya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di

lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun gambaran umum kondisi kepegawaian yang berjumlah 6.371 orang, dapat dilihat sebagaimana rincian tabel berikut.

**Tabel 1.10**  
**Gambaran Umum Kondisi Kepegawaian di Lingkup Pemerintah**  
**Provinsi Sulawesi Barat (Desember 2023)**

N O.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
I	<b>Per Jenis Golongan</b>			
	Golongan IV	717	616	1333
	Golongan III	1703	1869	3572
	Golongan II	455	295	750
	Golongan I	5	5	9
II	<b>Per Jenis Jabatan</b>			
	JPT Pratama	1	0	1
	JPT Madya	41	3	44
	Administrator	151	57	208
	Pengawas	144	105	249
	Pelaksana	1115	978	2093
	Fungsional	1333	1509	2842
	CPNS	95	132	227
III	<b>Per Jenis Pendidikan</b>			
	Strata-III (S3)	6	0	6
	Strata-II (S2)	458	327	785
	Strata-I (S1)	1788	1995	3783
	Diploma-IV (D4)	31	18	49
	Diploma-III (D3)	140	224	364
	Diploma-II (D2)	10	7	17
	Diploma-I (D1)	1	2	3
	SMA	440	207	647
	SMP	3	4	7
	SD	3	0	3
IV	<b>Per Jenis Eselon</b>			
	Eselon I-b	1	0	1
	Eselon II-a	35	3	38
	Eselon II-b	6	0	6
	Eselon III-a	118	46	164
	Eselon III-b	33	11	44
	Eselon IV-a	142	104	246
	Eselon IV-b	2	1	3

#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,26 persen. Pertumbuhan pendapatan pada Tahun 2022 yakni sebesar 11,86 persen dengan nominal senilai Rp. 457.963.285.700,39 sedangkan pada Tahun 2023

mengalami kenaikan senilai Rp.461.885.073.416 atau sebesar 12,33 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Secara umum, jika dibandingkan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah, terjadi pelampauan dari target yang ditetapkan sebesar 0,02 persen. Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar 96,33 persen atau senilai Rp.461.885.073.416 dari target yang ditetapkan dengan nominal senilai Rp.479.470.440.628, yang mencakup jenis pendapatan Pajak Daerah sebesar 97,34 persen atau senilai Rp. 461.885.073.416 dari target yang ditetapkan, pendapatan Retribusi Daerah sebesar 64,29 persen atau senilai Rp.2.504.717.343 dari target yang ditetapkan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 98,95 persen atau senilai Rp.8.097.676.056 dari target yang ditetapkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 92,35 persen atau senilai Rp.66.361.840.644,69 dari target yang ditetapkan.

Pada kelompok Pendapatan Transfer secara keseluruhan sebesar 98,98 persen dari target yang ditetapkan dengan nominal senilai Rp. 1.552.291.183.082, pada jenis pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 170,47 persen atau senilai Rp. 23.336.799.350, pendapatan Dana Alokasi Umum sebesar 100,68 persen atau senilai Rp. 1.013.057.823.757, pendapatan Dana Alokasi Khusus (fisik) sebesar 99,26 persen atau senilai Rp. 308.579.832.429, Dana Alokasi Khusus (non fisik) sebesar 99,26 persen atau senilai Rp. 198.601.271.676 Sedangkan Dana Insentif Daerah sebesar 0 persen. Pada kelompok Lain-lain Pendapatan Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 151,51 persen atau senilai Rp. 2.479.646.298 dari target jenis pendapatan yang ditetapkan, Lain-lain Pendapatan Yang Sah yaitu Pendapatan Hibah sebesar 151,51 persen atau senilai Rp. 1.092.000.000

**Tabel 1.11**  
**Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan**  
**Tahun Anggaran 2023**

<b>URAIAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>ANGGARAN TAHUN 2023</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>479.470.440.628</b>	<b>454.401.087.253,69</b>
Pendapatan Pajak Daerah	393.538.458.610	383.079.135.260
Pendapatan Retribusi Daerah	3.896.180.000	537.958.940
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.183.285.026	8.097.676.056
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	73.852.516.992	68.203.544.757
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.568.344.679.690</b>	<b>1.552.291.183.082</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	13.690.048.000	23.336.799.350



Dana Alokasi Umum (DAU)	1.006.215.801.000	1.013.152.771.627
Dana Alokasi Khusus (DAK)	339.736.586.000	308.579.832.829
Dana Insentif Daerah (DID)	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.092.000.000	2.479.646.298
Pendapatan Hibah	1.092.000.000	2.479.646.298
Pendapatan Lainnya	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>2.048.907.120.318</b>	<b>2.009.171.916.633,69</b>

Sumber : BPKPD Prov. Sulawesi Barat, 2023 (data sementara)

### 1) Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Untuk Tahun Anggaran 2023, Belanja Daerah terdiri dari 4 (empat) kelompok belanja yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Secara umum, jika dibandingkan antara target dan realisasi Belanja Daerah, masih terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar 5,52 persen dari yang targetkan.

Pada kelompok Belanja Operasi terdapat alokasi anggaran terserap sebesar 97,84 persen atau senilai Rp. 1.410.637.165.363,00 dari Pagu yang ditetapkan senilai Rp. 1.441.776.226.638. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Barang dan Jasa senilai Rp.668.024.447.607 dengan realisasi sebesar 94,21 persen atau senilai Rp.629.331.870.927,73, Belanja Bunga senilai Rp.24.894.625.310 dengan realisasi sebesar 99,98 persen atau senilai 24.890.208.737,00, Belanja Hibah senilai Rp.57.769.529.600 dengan realisasi sebesar 84,83 persen atau senilai Rp.49.008.114.035,00, Belanja Bantuan Sosial sebesar 98,53 persen atau senilai Rp. 1.634.000.000 dengan realisasi sebesar 98,53 atau senilai Rp.1.610.000.000,00 sedangkan Belanja Pegawai mengalami penyerapan sebesar 96,58 persen atau senilai Rp. 606.681.872.765,00 dari target yang ditetapkan senilai Rp.628.157.169.791.

Pada kelompok Belanja Modal, secara umum terdapat alokasi anggaran yang terserap sebesar 91,24 atau senilai Rp.546.950.889.716,00 dengan pagu senilai Rp.599.493.986.273 yang tersebar pada jenis Belanja Modal Tanah sebesar 87,91 persen atau senilai Rp.17.898.298.672,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 82,45 persen atau senilai Rp.91.334.209.198,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 93,41 persen atau senilai Rp.131.964.794.775,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 93,59 persen atau senilai Rp.272.994.673.862,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 92,58 persen atau senilai Rp.32.758.913.209,00, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 87,11 persen yakni Rp. 7.744.995.004 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.891.233.060.

Untuk lebih jelasnya berikut relisasi belanja menurut jenisnya pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.12**  
**Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja**  
**Tahun Anggaran 2023**

URAIAN BELANJA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (Rp.)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.441.771.226.683</b>	1.410.637.165.363
Belanja Pegawai	644.454.056.816	644.454.056.816
Belanja Barang dan Jasa	733.250.373.532	706.111.980.706
Belanja Bunga	18.432.685.502	18.432.685.502
Belanja Subsidi		-
Belanja Hibah	41.574.100.788	40.722.600.788
Belanja Bantuan Sosial	4.065.000.000	4.055.000.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>445.772.978.540</b>	414.785.851.097
Belanja Tanah	19.005.138.018	18.719.773.147
Belanja Peralatan dan Mesin	157.998.778.925	156.434.979.761
Belanja Bangunan dan Gedung	144.882.209.047	123.172.544.732
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.112.268.610	106.203.948.717
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.263.058.880	1.280.229.536
Belanja Aset Lainnya	8.891.233.060	7.744.995.004
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.990.269.459</b>	349.322.500
Belanja Tidak Terduga	<b>5.990.269.459</b>	349.322.500
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>209.840.321.348</b>	205.112.796.348
Belanja Bagi Hasil	196.905.296.348	196.905.296.348
Belanja Bantuan Keuangan	12.935.025.000	8.207.500.000
<b>JUMLAH</b>		

Sumber: BPKPD Prov. Sulawesi Barat, 2023 (data sementara)

## 2) Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2018 sampai dengan 2023 terus mengalami fluktuatif. Pertumbuhan pembiayaan netto tertinggi terjadi pada Tahun 2022 yakni sebesar 136,44 persen dengan nominal Rp.180.056.201.202,62 jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Sedangkan pada Tahun 2018 pembiayaan netto hanya sebesar 21,47 persen dengan nominal Rp.12.213.277.162,54 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk Tahun Anggaran 2023, Pembiayaan Daerah terdiri dari 2 (dua) kelompok pembiayaan yakni Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 100 persen atau sebesar Rp. 116.924.453.298,84, Jenis penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terealisasi sebesar 65,14 persen atau senilai Rp. 40.684.031.871,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah terserap sebesar 100 persen atau senilai Rp. 116.924.453.298,84. Untuk kelompok Pengeluaran Pembiayaan dapat terealisasi sebesar 65,14 persen atau sebesar Rp. 40.684.031.871,00 dari yang ditargetkan, dengan jenis rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo senilai Rp.76.240.421.427,84.

**Tabel 1.13**  
**Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan**  
**Tahun Anggaran 2023**

<b>URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>REALISASI ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	365.969.587.736,14
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	170.299.649.601,14
Penerimaan Pinjaman Daerah	195.669.938.135,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	53.945.712.546,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	53.945.712.546,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>312.023.875.190,14</b>
<b>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	<b>123.895.790.509,10</b>

*Sumber : BPKPD Prov. Sulawesi Barat, 2023 (data Sementara)*

### **1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah**

Permasalahan strategis pemerintahan daerah menjadi bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Analisis permasalahan yang dilakukan secara tepat akan meningkatkan upaya intervensi melalui kebijakan dalam mengatasi permasalahan. Demikian juga dengan pemilihan isu strategis yang sesuai dan relevan akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh para pengambil kebijakan. Isu Strategis merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif maupun negatif yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan sangat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Permasalahan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan daerah akan dibagi menjadi dua bagian yaitu permasalahan pembangunan lingkup makro yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah dan yang kedua adalah permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan.

Sedangkan isu strategis yang disusun dikelompokkan berdasarkan isu global, nasional, dan isu regional di wilayah Sulawesi. Identifikasi dan perumusan permasalahan dan isu strategis tersebut merupakan dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan periodisasi Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

#### **a. Permasalahan Pembangunan**

Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026 mendatang. Berikut ini berbagai permasalahan pembangunan di Sulawesi Barat yang terbagi atas dua bagian, antara lain Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaran urusan pemerintahan

##### **1) Permasalahan Pembangunan Daerah pada Leve Makro**

###### **(1) Melambatnya Kinerja Ekonomi**

Kondisi Perekonomian Sulawesi Barat mengalami penurunan dan perlambatan sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 pertumbuhan

ekonomi Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,62 persen, menurun menjadi 6,25 persen di tahun 2018. Memasuki tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan menjadi 5,66 persen, meskipun di tiga tahun tersebut pertumbuhannya masih berada di atas rata-rata nasional. Namun memasuki periode tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami kontraksi minus 2,42 persen bahkan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang juga mengalami kontraksi minus 2,07 persen pada saat itu. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun juga berdampak pada sektor ekonomi di daerah. Penurunan ekonomi secara global maupun nasional, akan mempengaruhi kinerja ekonomi di Sulawesi Barat, hal ini sebagai dampak dari menurunnya sisi permintaan dan penawaran karena kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya pembatasan sosial yang berdampak pada gangguan logistik barang.

Dampak covid-19 sangat terasa pada tahun 2020, hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan terjadinya kontraksi pada beberapa lapangan usaha. Terdapat sebanyak 10 lapangan usaha mengalami kontraksi diantaranya adalah lapangan usaha konstruksi (-13,31%), disusul Administrasi Pemerintahan (-8,61%), penyediaan akomodasi dan makan minum (-7,19%), jasa pendidikan (-6,65%), Transportasi dan Pergudangan (-6,47%), Jasa perusahaan (-5,42%), Jasa lainnya (5,08%), Pertambangan dan Penggalian (-4,90%), Industri Pengolahan (-3,52%), Perdagangan (-2,60%). Sedangkan lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif antara lain Pengadaan Listrik dan Gas (6,85%) hal ini didukung oleh kebijakan Work From Home yang meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga, selanjutnya adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (6,76%), Informasi dan Komunikasi (5,73%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (2,36%), Real Estate (1,90%), Pengadaan Air dan pengelolaan sampah (1,63%), serta pertanian yang menjadi kontributor terbesar ekonomi di Sulawesi Barat hanya tumbuh sebesar 0,54 persen di tahun 2020.

Penurunan kinerja sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir dan puncaknya pada tahun 2020, sangat dipengaruhi oleh penurunan

produksi, produktivitas dan permasalahan nilai tambah sektor pertanian yang belum berjalan optimal. Hal itu kemudian memberi dampak terhadap melambatnya kinerja ekonomi secara keseluruhan di Sulawesi Barat. Belum optimalnya pengelolaan komoditi hulu hingga ke hilir, mulai dari upaya penerapan teknologi, penyiapan SDM, sarana prasarana, dan akses pasar menjadi sebuah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan intervensi kebijakan dalam memaksimalkan sektor tersebut agar dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kedepan khususnya di Sulawesi Barat.

Melambatnya kinerja ekonomi disebabkan karena Belum Optimalnya Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian hal ini disebabkan karena Belum optimalnya pengelolaan komoditi sektor pertanian, Rendahnya penerapan teknologi Pertanian. Rendahnya SDM Pertanian, Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana produksi, Minimnya penggunaan teknologi untuk peningkatan dan pengolahan produk hasil Pertanian, Masih rendahnya akses terhadap pemasaran produk dan Belum maksimalnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM.

## (2) Rendahnya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin

Standar hidup dan daya beli masyarakat masih menjadi permasalahan utama di Sulawesi Barat. Tingkat kemiskinan yang tinggi baik perkotaan dan perdesaan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan masyarakat menjadi masalah yang dapat menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat. Standar hidup dan kualitas hidup penduduk dapat dilihat melalui ukuran Pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita penduduk di Sulawesi Barat menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional dimana pada tahun 2017 sebesar 29,6 juta dan di tahun 2019 meningkat menjadi 34,1 juta. Memasuki tahun 2020 pendapatan perkapita mengalami penurunan menjadi 33,3 juta, hal ini seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid-19.

Ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat meskipun mengalami fluktuasi namun masih berada dalam tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan data indeks gini rasio atau ketimpangan pendapatan di

Sulawesi Barat pada tahun 2017 sebesar 0,339 poin mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 0,366 poin. Kondisi tersebut menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, dimana gini rasio perkotaan sebesar 0,451 poin dan gini rasio perdesaan 0,326 poin tahun 2021. Terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap kesempatan kerja dan akses terhadap modal usaha, rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, serta tingginya ketimpangan kekayaan diantara masyarakat.

Standar hidup juga sangat erat kaitanya dengan masalah kemiskinan di Sulawesi Barat yang cukup tinggi masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2017 kemiskinan sebesar 11,18 persen dan mengalami penurunan tahun

2019 menjadi 10,95 persen, namun memasuki tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 11,50 persen, sebuah angka yang cukup tinggi dalam capaian kurun waktu lima tahun terakhir, hal tersebut salah satunya disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan. Kemudian pada tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada angka 11,85 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 165,99 ribu jiwa. Adapun penduduk miskin terbesar berada pada wilayah perdesaan sebesar 82,31 persen dan miskin perkotaan sekitar 17,69 persen. Tingginya penduduk miskin di Sulawesi Barat, disebabkan oleh belum maksimalnya upaya pemberdayaan masyarakat khususnya pada wilayah kantong kemiskinan, selain itu masih rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat ekonomi bawah, belum optimalnya perlindungan dan jaminan Sosial serta belum optimalnya pengelolaan data Kemiskinan yang memiliki validitas tinggi yang dapat menjadi rujukan intervensi kebijakan. Dari total penduduk miskin yang ada, sebanyak 71,7 persen diantaranya berada pada 3 kabupaten yaitu Majene, Mamasa dan Polewali Mandar sehingga intervensi perlu dioptimalkan pada tiga kabupaten prioritas tersebut.

Permasalahan rendahnya standar hidup juga erat kaitanya dengan rendahnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Belum optimalnya pengembangan investasi dan lapangan usaha dalam

menyerap tenaga kerja secara besar menyebabkan kesempatan kerja yang terbatas. Kondisi tingkat pengangguran di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 3,21 persen, menurun menjadi 2,98 persen di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3,32 persen dan kembali mengalami perbaikan di tahun 2021 yaitu sebesar 3,13 persen, dengan jumlah pengangguran sebanyak 22,21 ribu jiwa. Kondisi pandemi covid-19 juga sangat mempengaruhi terhadap upaya penurunan tingkat pengangguran di Sulawesi Barat. Adapun tingkat pengangguran terbesar berada di Kabupaten Majene sebesar 4,26 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 2,71 persen. Meskipun pengangguran di Sulawesi Barat masih tergolong rendah, hanya saja kualitas dari tenaga kerja kita masih perlu mendapat perhatian, dimana pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sebesar 64,43 persen atau sekitar 433,6 ribu jiwa. Selain itu, masih rendahnya kompetensi dan skill tenaga kerja dan minimnya pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja serta belum optimalnya pendidikan vokasi dan peningkatan wirausaha baru menjadi mata rantai permasalahan dalam peningkatan produktivitas dan lapangan usaha masyarakat di Sulawesi Barat.

Rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat disebabkan karena Tingginya Angka Kemiskinan, Masih Adanya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat, Masih Rendahnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan hal tersebut diawali dengan akar permasalahannya adalah :

- (a) Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat, Rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat ekonomi bawah, Belum optimalnya perlindungan dan jaminan Sosial, Belum optimalnya pengelolaan Data Kemiskinan yang Valid.
- (b) Rendahnya akses terhadap kesempatan kerja dan akses terhadap modal usaha, Rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, Tingginya ketimpangan kekayaan.
- (c) Belum Optimalnya pengembangan Investasi dan Lapangan Usaha yang dapat menyerap tenaga Kerja, Masih rendahnya Kompetensi dan Skill Tenaga kerja. Minimnya sertifikasi tenaga kerja, Belum



optimalnya pendampingan bagi tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Belum optimalnya peningkatan wirausaha baru.

(3) Masih rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 pertumbuhan IPM selalui tumbuh positif. Pada tahun 2017 sebesar 64,30 poin meningkat menjadi 66,36 poin pada tahun 2021. Meskipun demikian, IPM Sulawesi Barat masih berada pada kategori level sedang dan masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 72,29 poin yang sudah dalam kategori level tinggi. Belum signifikannya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berdampak pada nilai indeks yang masih rendah.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia dari sektor pendidikan yaitu Rata-rata lama sekolah, dimana RLS di Sulawesi Barat mencapai 7,96 tahun berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,54 tahun. Komponen berikutnya adalah Harapan Lama Sekolah. HLS di Sulawesi Barat sebesar 12,86 tahun di bawah rata-rata nasional sebesar 13,08 tahun. Permasalahan utama yang terkait sektor pendidikan di Sulawesi Barat yaitu masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, masih rendahnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan serta perlunya perubahan pola pikir dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan data angka anak tidak sekolah yang masih tinggi sebesar 10,25% atau sekitar 32 ribu anak di Sulawesi Barat yang tidak bersekolah, merupakan yang tertinggi di Kawasan Regional Sulawesi.

Dari dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup di Sulawesi Barat sebesar 65,25 tahun sementara nasional sebesar 71,57 tahun. Rendahnya angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kematian bayi sebesar 303 kasus, kematian balita sebesar 325 kasus, dan jumlah kematian Ibu sebesar 46 kasus di tahun

2020. Beberapa permasalahan di sektor kesehatan sangat berkaitan dengan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas, perilaku hidup bersih dan sehat yang belum berjalan secara ideal, terbatasnya Sumberdaya Manusia bidang kesehatan terutama tenaga kesehatan yang berkompeten.

Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti **Lingkungan**, dimana masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih (22,93%) dan masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses sanitasi layak (27,25%), faktor yang kedua adalah **Perilaku Kesehatan**, diantaranya proporsi persalinan di fasilitas kesehatan baru mencapai 68,50% (Riskesdas 2018), masih tingginya pernikahan usia anak mencapai 19,20% tertinggi ke-tiga secara nasional. Faktor selanjutnya adalah **Pelayanan kesehatan** terkait dengan penyediaan Akses dan Fasilitas Kesehatan dimana berdasarkan data bahwa Akses Desa/Kelurahan menuju rumah sakit sebesar 46,7%, Rumah sakit bersalin 15,0%, Puskesmas 74,9%, Poliklinik 37,7%, dan Akses Desa/Kelurahan menuju ke tempat Dokter sebesar 63,1% (Podes 2018, TNP2K) dan selanjutnya adalah faktor **keturunan** yang hanya berkontribusi sebesar 5 persen terhadap derajat kesehatan.

Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Barat juga disebabkan oleh tingginya angka stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 48,02 persen dan pada tahun 2018 angka stunting turun menjadi 41,8 persen, merupakan yang tertinggi kedua secara nasional. Pada tahun 2021 berdasarkan data SSGI Kemenkes, angka stunting mengalami penurunan sebesar 33,8 persen, penurunan tersebut juga diikuti oleh penurunan daerah lainnya yang juga secara masif melakukan kebijakan penanganan stunting, hal itu menyebabkan stunting di Sulawesi Barat meskipun mengalami penurunan namun masih menempati urutan kedua secara nasional di bawah Nusa Tenggara Timur. Stunting sangat erat kaitanya dengan upaya pemenuhan gizi, dimana masih rendahnya pola konsumsi pangan dan

akses terhadap pangan bergizi serta sektor terkait lainnya seperti sanitasi dan air bersih yang berkualitas juga sangat mempengaruhi permasalahan stunting.

4.1 Tabel  
Pohon Masalah  
“Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia”

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
- Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.	- Masih Rendahnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.</li> <li>- Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.</li> <li>- Masih rendahnya jumlah sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).</li> <li>- Masih rendahnya pemenuhan SPM Bidang Pendidikan.</li> <li>- Minimnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.</li> <li>- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.</li> <li>- Masih terbatasnya ketersediaan SDM kesehatan yang berkompeten.</li> <li>- Masih rendahnya tingkat akreditasi pelayanan kesehatan.</li> </ul>
-	- Tingginya Angka Prevalensi Stunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi.</li> <li>- Minimnya akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih yang berkualitas.</li> <li>- Masih tingginya angka pernikahan usia dini.</li> </ul>

(4) Masih rendahnya tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan inti dari sebuah pemerintahan, terutama dalam mengimplementasikan pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik akan menciptakan

pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta sinergi yang baik antara pemerintahan dan masyarakat. untuk mencapai pemerintahan yang baik harus memperhatikan empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu *accountability, transparency, predictability, dan participation*. keempat hal itu, akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan di daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Rendahnya tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset, pengawasan, SDM aparatur, manajemen pengadaan barang dan jasa serta yang terkait dengan perizinan. Kualitas pelayanan publik yang baik juga sangat menentukan berjalannya tata kelola pemerintahan yang efektif, khususnya untuk pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan dan upaya penataan organisasi pemerintahan. Hal lain yang juga terkait adalah akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, manajemen perencanaan dan pelaksanaan kinerja birokrasi.

Capaian Indeks reformasi birokrasi di Sulawesi Barat telah mengalami peningkatan dari “CC” di tahun 2017 menjadi “B” di tahun 2019. Penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundangundangan, dan pelayanan publik.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian seperti :

- (a) Masih Rendahnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disebabkan karena Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah, Belum optimalnya pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Masih rendahnya sistem manajemen SDM Aparatur. Belum optimalnya manajemen pengadaan barang dan jasa, Belum optimalnya manajemen perizinan.
- (b) Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik yang disebabkan oleh Masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan, Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, Belum optimalnya penataan organisasi.

(c) Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi seperti Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar, manajemen perencanaan rendah.

(5) Minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan

Dalam mendukung berbagai kinerja pembangunan, maka dibutuhkan dukungan infrastruktur sebagai penunjang. Pembangunan infrastruktur dilakukan berbasis wilayah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan daerah agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Barat. Pembangunan infrastruktur saat ini juga difokuskan dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah antar kabupaten khususnya dalam membuka akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra produksi komoditi yang ada di Sulawesi Barat.

Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah masih menjadi masalah utama di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai provinsi yang masih tergolong muda, masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan berbagai infrastruktur konektivitas. Aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah sangat mempengaruhi distribusi barang maupun jasa. Peningkatan aksesibilitas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan. Kondisi mantap jalan provinsi baru mencapai 39,58 persen pada tahun 2020 dan sepertinya sulit memenuhi target akhir di tahun 2022. Disamping itu fasilitas keselamatan jalan masih sangat rendah serta infrastruktur telekomunikasi yang belum sepenuhnya menjangkau daerah khususnya di wilayah perdesaan di Sulawesi Barat.

Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat 2 pelabuhan udara, namun hanya satu yang sementara beroperasi dengan kapasitas yang belum optimal dan masih perlu pengembangan. Adapun pelabuhan laut di Sulawesi Barat sebanyak 17 Pelabuhan yang terdiri dari pelabuhan pengumpul sebanyak 2 unit, pelabuhan pengumpan regional sebanyak 4 unit dan pelabuhan pengumpan lokal sebanyak 11 unit, sebagian besar pelabuhan dalam kondisi belum seluruhnya memenuhi standar dan masih dibutuhkan pengembangan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan Infrastruktur Dasar Masyarakat juga masih menjadi kendala di Sulawesi Barat. Infrastruktur dasar masyarakat yang utama dan harus dipenuhi dengan layak adalah masalah perumahan dan pemukiman yang menjadi kebutuhan dasar. Jumlah rumah layak di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 sebanyak 263.835 rumah dan meningkat di tahun 2020 menjadi 299.365 rumah.

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka rasio rumah layak huni baru mencapai 0,211 jiwa/rumah. Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila rumah memiliki sanitasi yang baik. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 mencapai 59,48 persen dan meningkat menjadi 72,75 di tahun 2020. Masih rendahnya capaian tersebut perlu mendapat perhatian karena sanitasi yang layak sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat.

Persentase rumah tangga dengan sumber air minum di Sulawesi Barat juga masih sangat rendah dimana air untuk air leding baru mencapai 10,09 persen, dan air dalam kemasan mencapai 26,22 persen. Dan untuk infrastruktur listrik di Sulawesi Barat sudah menggambarkan kondisi cukup baik dimana rasio elektrifikasi tahun 2020 sebesar 96,95 persen namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan terutama penyediaan infrastruktur listrik pada daerah yang terisolir dengan kondisi rumah tangga miskin yang masih besar.

Pembangunan yang baik tentunya harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat berada pada angka 74,29 di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menjaga degradasi lingkungan di Sulawesi Barat. Beberapa hal yang sangat terkait dengan permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup antara lain tingginya degradasi lingkungan pada wilayah pesisir. Sulawesi Barat yang merupakan wilayah pesisir sangat rentan terhadap terjadinya degradasi lingkungan pada wilayah tersebut, hal itu bisa terjadi jika kebijakan pembangunan dilaksanakan tanpa memperhatikan ekosistem di wilayah pesisir khususnya hutan mangrove di Sulawesi Barat. Permasalahan lainnya adalah masih tingginya luas lahan kritis yang belum tertangani serta

pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis yang dapat menimbulkan pencemaran. Pengelolaan sumberdaya alam tanpa memperhatikan lingkungan akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, yang akan memicu terjadinya bencana banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi.

Lingkungan dan ekosistem yang terjaga akan meminimalisir terjadinya bencana. Hal ini sangat menunjang bagi upaya mitigasi bencana di Sulawesi Barat. sebagaimana kita ketahui bahwa Sulawesi Barat memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak daerah ini dari sisi geologis dan geografis. Berdasarkan nilai Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun, Provinsi Sulawesi memiliki nilai indeks tertinggi secara nasional yaitu sebesar 166,49 berada pada kategori tinggi. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya yaitu bahaya, keter-paparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Provinsi Sulawesi Barat juga diperhadapkan pada kondisi bencana gempa bumi yang terjadi pada Januari tahun 2021 yang lalu bermagnitudo 6,2. Upaya pemulihan pasca bencana tersebut belum berjalan secara optimal dan menjadi sebuah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan intervensi dari pemerintah terutama dalam reskonstruksi pasca bencana tersebut.

#### 4.2 Tabel

##### Pohon Masalah

“Minimnya aksesibilitas infrastruktur yang berkelanjutan”

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
- Minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan.	- Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah.	- Masih rendahnya jalan provinsi dalam kondisi mantap. - Minimnya fasilitas keselamatan jalan provinsi. - Masih minimnya cakupan sinyal telekomunikasi di wilayah perdesaan.
-	- Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Masyarakat.	- Masih rendahnya rumah tangga dengan akses air minum layak. - Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. - Masih banyaknya jumlah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		rumah tangga yang terlayani listrik (PLN dan non-PLN). - Masih rendahnya rumah layak huni masyarakat.
-	- Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.	- Tingginya degradasi lingkungan pada wilayah pesisir. - Tingginya luas lahan kritis yang belum tertangani. - Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis. - Masih tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana. - Belum optimalnya sistem pemulihan pasca bencana.

**b. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Penyelenggaran Urusan Pemerintahan.**

**1) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

**(1) Pendidikan**

- (a) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (7,96 tahun) dan rendahnya harapan lama sekolah (12,86 tahun) pada tahun 2021.
- (b) Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA sederajat dan jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2020 angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA sebesar 69,84 persen sedangkan angka partisipasi sekolah pada jenjang perguruan tinggi hanya sebesar 23,24 persen.
- (c) Masih kurangnya kuantitas guru pada jenjang Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan.
- (d) Masih rendahnya kualitas guru, khususnya guru yang profesional (guru yang telah memiliki sertifikat pendidik).
- (e) Belum meratanya distribusi guru pada semua jenjang pendidikan



- (f) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap tingkatan pendidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

## (2) Kesehatan

- (a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi. Jumlah Kasus kematian Ibu pada tahun 2020 sebesar 46 Kasus sedangkan untuk kasus kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 303 Kasus. Angka kasus kematian Ibu dan Bayi belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 32 kasus untuk Jumlah Kematian Ibu dan 257 kasus untuk Jumlah Kematian Bayi.
- (b) Tingginya angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 33,8 persen di atas angka rata-rata nasional yaitu 24,4 Persen serta menempati urutan kedua tertinggi secara nasional.
- (c) Rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas serta terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan.
- (d) Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular.
- (e) Belum maksimalnya jumlah peserta jaminan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan baru mencapai angka 87,93 persen.
- (f) Belum maksimalnya akses terhadap sanitasi layak. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat baru mencapai 77,07 persen.
- (g) Belum optimalnya implementasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

## (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- (a) Tingginya persentase jalan provinsi yang belum mantap. Panjang jalan provinsi yaitu sebesar 349,67 dimana pada tahun 2020 Kondisi jalan yang tidak mantap sebesar 60,42 persen atau sepanjang 211,27 km sedangkan yang berada pada kondisi mantap sebesar 39,58 persen atau sepanjang 138,39 km.
- (b) Belum terpenuhinya standar jalan pada sebagian besar jalan provinsi.

- (c) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum, pada tahun 2020 masih terdapat 26,22 persen rumah tangga menggunakan air kemasan.
  - (d) Tingginya kerusakan jaringan irigasi, pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik hanya sebesar 43,31 persen atau 19.470 hektare dari 44.956,54 hektar.
  - (e) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah dan drainase).
  - (f) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional, pada tahun 2018 persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk baru mencapai 9,8 persen.
  - (g) Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang
  - (h) Terbatasnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, pada tahun 2018 persentase rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB baru mencapai 11,09 persen.
  - (i) Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi.
- (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- (a) Rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin serta tingginya backlog (tidak seimbangnya kebutuhan dan penyediaan) rumah. Angka kebutuhan rumah hingga tahun 2018 sebesar 40.005 unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 98.511 unit pada tahun 2020.
  - (b) Belum optimalnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase akses terhadap sanitasi layak di Sulawesi Barat sebesar 77,07 persen tahun 2020.
- (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- (a) Satuan Polisi Pamongpraaja dan Pemadam Kebakaran
    - Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berlaku kepada masyarakat.
    - Masih kurangnya tenaga yang mengikuti diklat PPNS dan diklat dasar Satpol PP.

- Belum Optimalnya penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat.

(b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Belum tersedianya peta rawan bencana Daerah.
- Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana sebagai langkah dalam mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana.
- Minimnya sarana prasarana tanggap darurat penanggulangan bencana.

(6) Sosial

- (a) Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- (b) Belum terintegrasinya upaya penanggulangan kemiskinan;
- (c) Masih rendahnya kualitas penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sebagai bentuk pemenuhan SPM bidang sosial;
- (d) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi anak;
- (e) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- (f) Belum maksimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

**2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

(1) Tenaga Kerja

- (a) Kurangnya lapangan kerja, terlihat dari tingginya pencari Kerja Terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 3.318, sedangkan lowongan kerja terdaftar sebanyak 543, penempatan atau pemenuhan tenaga kerja sebanyak 1.372.
- (b) Rendahnya Kualitas tenaga kerja terlihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja yang ditamatkan masih di dominasi SMP ke bawah yaitu sebanyak 412.430 jiwa atau 62,83 persen, selanjutnya untuk SMA dan SMK 150.440 jiwa atau 22,92 persen, dan yang memiliki Pendidikan Tinggi yaitu Diploma dan Universitas 93.510 jiwa atau 14,25 persen pada tahun 2023

(2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- (a) Kurangnya pemahaman konsep gender, PUG dan penerapan Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Barat;
  - (b) Kurangnya pemahaman tentang three ends (kekerasan perempuan dan anak, perdagangan orang (human trafficking) dan kesenjangan ekonomi);
  - (c) Masih tingginya jumlah pekerja usia anak. Jumlah pekerja usia anak pada tahun 2020 mencapai 5,28 persen dibandingkan pada tahun 2019 3,46 persen;
  - (d) Tingginya pernikahan usia anak di Sulawesi Barat berada pada urutan ke tiga secara nasional di tahun 2023;
  - (e) Tingginya angka kekerasan terhadap ibu dan anak. Pada tahun 2016 jumlah korban KDRT sebanyak 126 kasus meningkat di tahun 2017 sebanyak 177 kasus;
  - (f) Belum maksimalnya penanganan anak perlindungan khusus;
  - (g) Belum optimalnya wadah P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) dalam menanggulangi kasus.
- (3) Pangan
- (a) Pangan belum terdistribusikan dengan baik;
  - (b) Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan;
  - (c) Masih terdapatnya daerah rawan pangan.
  - (d) Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah Daerah.
  - (e) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.
  - (f) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar dan bermutu.
- (4) Lingkungan Hidup
- (a) Masih banyaknya lahan kritis, kerusakan hutan dan sumber-sumber air.
  - (b) Banyaknya kerusakan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - (c) Tingginya pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah;
  - (d) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
  - (e) Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- (5) Pertanahan

- (a) Banyaknya lahan yang belum bersertifikat. Persentase luas lahan yang bersertifikat hanya sebesar 25,27 persen dari luas APL;
- (b) Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah;
- (c) Tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat dengan perusahaan;
- (d) Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T);
- (6) Administrasi Kependudukan
  - (a) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
  - (b) Belum optimalnya pengendalian penduduk;
  - (c) Belum optimalnya akses data kependudukan dan pencatatan sipil;
  - (d) Tingginya penduduk rentan administrasi kependudukan;
- (7) Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - (a) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat desa;
  - (b) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa;
  - (c) Belum optimalnya pembinaan pranata sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
  - (d) Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
- (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - (a) Belum maksimal cakupan layanan KB;
  - (b) Belum optimalnya ketahanan keluarga;
  - (c) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja;
  - (d) Kurangnya intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
- (9) Perhubungan
  - (a) Belum berkembangnya sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan;
  - (b) Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi laut;
  - (c) Masih rendahnya kualitas pelayanan umum baik di bidang angkutan darat maupun angkutan sungai dan penyeberangan;

- (d) Belum optimalnya bandara dan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.

(10) Komunikasi dan Informatika

- (a) Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah;
- (b) Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi;
- (c) Belum optimalnya penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah;
- (d) Belum optimalnya layanan e-Government secara holistik dan dikelolanya data sebagai aset strategis.

**b. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Identifikasi permasalahan pada bagian ini, merupakan permasalahan pembangunan yang diklasifikasikan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menyangkut layanan dasar serta tugas dan fungsi tiap perangkat daerah.

**1. Urusan Pendidikan**

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang dituangkan dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana pada pasal 3 menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk menjalankan pembangunan bidang pendidikan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 12 mengatur bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah, yang pada gilirannya berujung pada peningkatan sumberdaya manusia Indonesia.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah besaran yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk untuk semua jenjang usia yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan nya. Nilai APK di Sulawesi Barat pada jenjang Sekolah Dasar tahun 2018 s.d. 2023 yang melebihi angka seratus persen hal tersebut menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD, baik itu anak-anak usia di atas 12 tahun ataupun anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 1.14**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**di Sulawesi Barat Tahun 2018-2023**

Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	SD	SMP	SMA
2020	106,05	84,67	84,36
2019	107,32	82,71	84,10
2018	108,56	82,36	84,48
2017	110,19	83,02	80,34
2016	106,23	81,00	83,49

Sumber : BPS, [sulbar.bps.go.id](http://sulbar.bps.go.id)

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Selain Angka Partisipasi Kasar (APK), salah satu indikator lainnya untuk mengukur keberhasilan pendidikan yaitu Angka Partisipasi Murni. APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Adapun tabel Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan tahun 2016– 2020 sebagai berikut.

**Tabel 1.15**  
**Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**di Sulawesi Barat Tahun 2016 -2023**

Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	SD	SMP	SMU
2020	95,80	69,98	58,05
2019	95,86	69,36	57,64
2018	95,83	69,43	57,58
2017	95,51	69,40	57,46
2016	95,41	69,10	57,08

Sumber: BPS, *bps.go.id*

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Persentase APM di Sulawesi Barat masih menunjukkan angka di bawah seratus persen. Hal itu berarti bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah tepat waktu. Dari tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan sehingga dapat dipastikan anak usia sekolah di Sulawesi Barat khususnya jenjang Sekolah Dasar telah mengenyam pendidikan. Terkait APM SMP dan SMU pertumbuhannya selalu meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Peningkatan ini terjadi karena intervensi pendidikan khususnya program kembali bersekolah yang dicanangkan oleh Pemerintah, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Selama kurun waktu sekitar lima tahun terlihat bahwa tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Sulawesi Barat yang digambarkan dengan Angka Partisipasi Sekolah relatif meningkat.



**Tabel 1.16**  
**Angka Partisipasi Sekolah**  
**di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020**

NO	TAHUN	7-12	13-15	16-18	19-24
1.	2020	98.33	90.07	69.84	23.24
2.	2019	98.34	89.92	69.31	23.64
3.	2018	98.25	89.95	68.69	24.10
4.	2017	98.10	89.88	68.03	23.49
5.	2016	98.08	89.93	67.34	22.36

Sumber: BPS, [bps.go.id](http://bps.go.id)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Sulawesi Barat pada jenjang SD dan SLTP sudah cukup memuaskan namun pada tingkat SLTA, Angka Partisipasi Sekolah masih sangat rendah yaitu sebesar 69,84 persen.

d) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Peningkatan partisipasi pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai. Pada tingkat pendidikan dasar yang terdiri dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SLTP) tahun 2019, memiliki jumlah gedung sekolah sebanyak 1.326 unit untuk SD dan 373 unit untuk tingkat SMP, dengan jumlah guru masing-masing 12.918 orang dan 5.143 orang dengan jumlah murid 154.304 orang untuk SD dan 60.341 untuk SMP.

Sementara pada jenjang pendidikan menengah, yang terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan dengan jumlah sekolah 137, jumlah siswa 29.487 orang dan jumlah guru sebesar 2.312 orang. Untuk SMA dengan jumlah sekolah sebesar 88 unit, jumlah murid sebesar 31.877 orang dan jumlah guru sebanyak 2.054 orang. Rasio murid terhadap sekolah terbesar pada jenjang pendidikan SMA dimana rasionya sebesar 362,24. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya sarana pendidikan seperti sekolah yang ada di Sulawesi Barat terutama pada jenjang pendidikan SMA.

**Tabel 1.17**  
**Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, (2021/2023)**

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	171	20 182	1 873	10,78	118,02
Polewali Mandar	333	44 710	3 492	12,80	134,26
Mamasa	261	17 230	2 652	6,50	66,02
Mamuju	309	33 097	2 782	11,90	107,11
Pasangkayu	135	19 519	1 355	14,41	144,59
Mamuju Tengah	116	13 960	1 142	12,22	120,34
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>1 325</b>	<b>148 698</b>	<b>13 296</b>	<b>11,18</b>	<b>112,22</b>

Sumber : Dknas Prov.Sulbar 2023

**Tabel 1.18**  
**Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, (2022/2023)**

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	37	7.759	606	12,80	209,70
Polewali Mandar	86	17.444	1.422	12,27	202,84
Mamasa	99	9.050	1.220	7,42	91,41
Mamuju	66	11.810	918	12,86	178,94
Pasangkayu	49	7.704	632	12,19	157,22
Mamuju Tengah	37	4.803	619	7,76	129,81
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>374</b>	<b>58.570</b>	<b>5.417</b>	<b>10,81</b>	<b>156,60</b>

Sumber: Dknas Prov.Sulbar 2023

**Tabel 1.19**  
**Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat, (2022/2023)**

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	16	5.322	434	13,05	335,25
Polewali Mandar	28	9.572	672	14,86	332,97
Mamasa	38	4.619	490	9,45	117,45
Mamuju	24	5.514	391	14,61	239,21
Pasangkayu	14	2.356	192	11,34	163,64
Mamuju Tengah	13	1.515	158	10,92	124,07
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>133</b>	<b>28.898</b>	<b>2.337</b>	<b>12,37</b>	<b>217,28</b>

Sumber: Dknas Prov.Sulbar 2023

**Tabel 1.20**  
**Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid- Sekolah,**  
**Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Sulawesi Barat, (2022/2023)**

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	7	3.732	270	14,53	543,71
Polewali Mandar	17	8.068	506	17,36	493,35
Mamasa	21	4.223	328	13,78	208,67
Mamuju	21	6.767	451	16,42	344,10
Pasangkayu	12	4.655	318	14,63	387,58
Mamuju Tengah	10	3.215	242	14,70	342,50
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>88</b>	<b>30.660</b>	<b>2.115</b>	<b>14,50</b>	<b>348,41</b>

Sumber: Diknas Prov.Sulbar 2023

Provinsi Sulawesi Barat memiliki 22 perguruan tinggi swasta yang terdiri dari 5 (lima) universitas, 4 (empat) akademi dan 13 (tiga belas) sekolah tinggi serta 1 (satu) perguruan tinggi negeri yaitu universitas Sulawesi Barat dan satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang berada di Kabupaten Majene. Peningkatan partisipasi pendidikan tentunya harus diikuti dengan berbagai peningkatan penyediaan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya di Sulawesi Barat.

e) Rasio Murid Per Guru

Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru juga digunakan sebagai indikator pendidikan yang secara umum menggambarkan ketersediaan atau kecukupan tenaga pendidikan. Angka ini menggambarkan beban seorang tenaga pendidik untuk mengajar beberapa orang murid. Beban yang besar menggambarkan kurangnya tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.

Rasio murid terhadap guru di Provinsi Sulawesi Barat jenjang SD sebesar 11,18, jenjang SMP sebesar 10,81, jenjang SMK sebesar 12,37 sedangkan untuk SMA rasio murid terhadap guru sebesar 14,50. Rasio murid terhadap guru untuk semua jenjang pendidikan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan angka tersebut belum menjadi ideal sehingga kebutuhan akan guru masih sangat diharapkan.

**Tabel 1.21**  
**Indikator Kinerja Bidang Pendidikan**

DINAS PENDIDI KANDAN KEBUDA YAAN	2015		2016		2017		2018		Keterangan / *)Sumber Data
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Angka pendidikan yang ditamatkan	281,926	88,91	278,062	84.31	274,283	82.59	279,754	85.19	Jenjang SD, SMP, SM
Penduduk berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	N/A	92,64	N/A	92,75	N/A	92,79	N/A	92,85	*) PDSPK Kemdikbud (penerima SUKMA/Surat Keterangan Melek Aksara)
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	1,438	16.71	1,608	18.57	1,752	20.40	1,921	21.63	Jumlah Ruang Kelasdalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	434	18.19	476	19.91	672	27.38	639	25.43	Jumlah Ruang Kelasdalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	821	47.40	790	44.86	886	47.23	1,000	48.22	Jumlah Ruang Kelasdalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SLB kondisi bangunan baik	68	34.69	35	30.70	19	16.67	51	27.72	Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20,678	18.60	22,312	19.94	22,602	19.72	22,615	19.46	Jumlah Sekolah PAUD/TK
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1,706	0.97	908	0.52	451	0.27	540	0.33	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	896	1.56	569	0.97	328	0.54	386	0.61	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,085	2.20	723	1.51	508	0.97	485	1.35	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	28,433	99.73	29,297	99.74	28,971	99.47	27,230	99.05	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	17,636	98.68	18,882	98.08	19,066	98.88	20,277	98.27	*) PDSPK Kemdikbud

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	15,290	98.19	14,931	96.50	14,329	96.13	15,488	95.81	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	20,439	71.88	21,469	73.28	20,980	72.42	20,349	74.73	*) PDSPK Kemdikbud
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	17,202	97.54	16,642	88.14	18,201	95.46	19,849	97.89	*) PDSPK Kemdikbud
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	17,415	72.08	15,341	66.88	15,971	75.63	15,186	77.55	*) PDSPK Kemdikbud (Jenjang SLB, SD, SMP, SM)
Guru yang bersertifikasi	NA	NA	7,378	34.78	7,381	33.09	6,126	29.05	*) PDSPK Kemdikbud

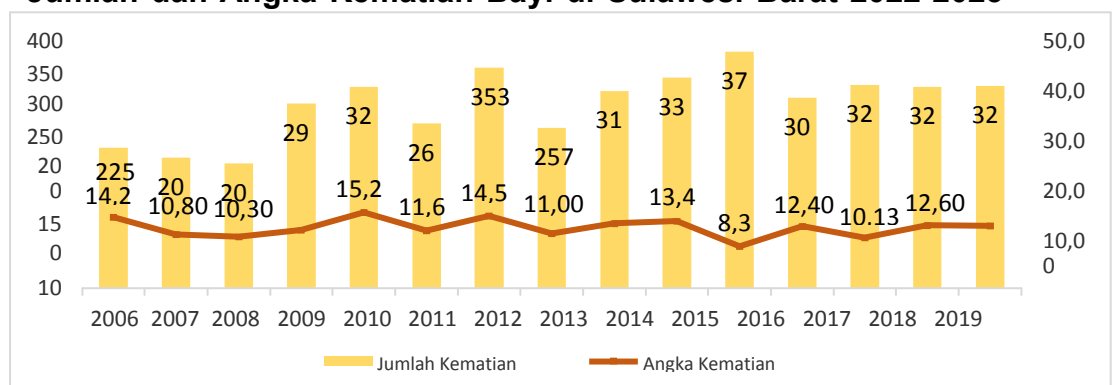
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2022

## 2. Urusan Kesehatan

### a. Angka Kematian Bayi

Sebagaimana gambaran perkembangan angka kematian ibu, angka kematian bayi juga mengalami fluktuasi selama kurun sepuluh tahun terakhir. Perkembangan jumlah kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Grafik 1.13**  
**Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 2022-2023**



Sumber: Dinkes Prov.Sulbar 2023

Angka kematian Bayi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 sebesar 8.38/1000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan pada tahun

2023 menjadi 12/1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kematian bayi yang cukup signifikan dari 379 bayi mati menjadi 303 bayi mati pada tahun 2023

Angka kematian Bayi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 sebesar 8.38/1000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 12/1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan jumlah kematian bayi yang cukup signifikan dari 379 bayi mati menjadi 303 bayi mati pada tahun 2023.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (*still birth*) atau yang mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari).

c. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (*still birth*) atau yang mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari).

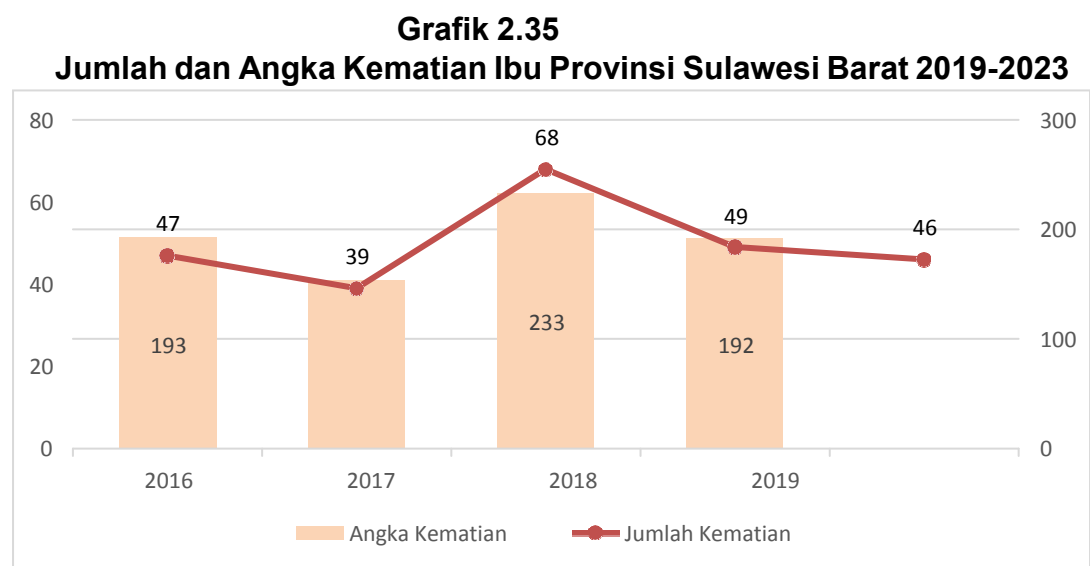
d. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat

kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (*still birth*) atau yang mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari).



Sumber: Diknas Prov.Sulbar 2023

Peran sektor kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi Sulawesi Barat harus diakui memang belum optimal, ditunjukkan dengan belum stabilnya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di Sulawesi Barat. Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir namun masih berfluktuasi setiap tahunnya dan angkanya masih cukup tinggi. Tahun 2014 angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka 180/100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 153/100.000 kelahiran hidup pada tahun

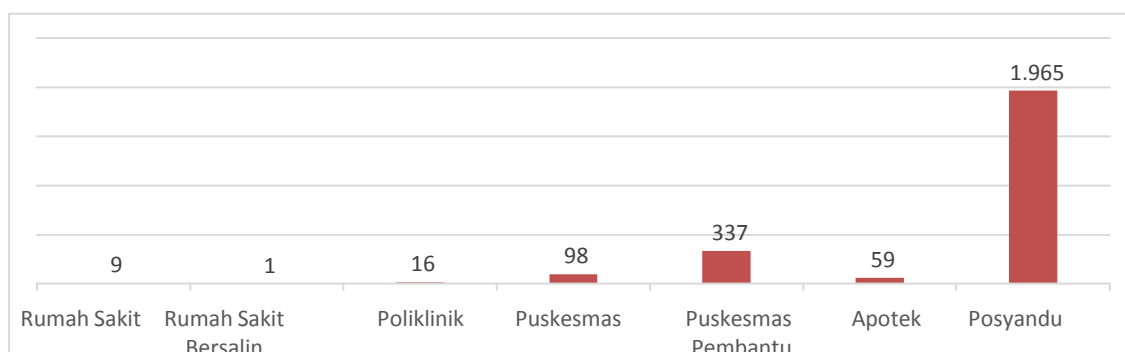
2017 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 233/100.000 kelahiran hidup, hal ini tentunya harus terus menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam melakukan upaya perbaikan di bidang kesehatan terutama menekan angka kematian ibu yang cukup besar.

Dari sisi jumlah kematian ibu di Sulawesi Barat masih terbilang tinggi. Jumlah kematian ibu yang hamil, bersalin, maupun nifas pada tahun 2019 sebesar 47 kasus, turun menjadi 39 kasus di tahun 2020 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 68 kasus, kembali turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 49 kasus dan kemudian turun menjadi 46 kasus di tahun 2023

e. Jumlah dan Rasio Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional mengingat faktor kesehatan menjadi tulang punggung atau titik tolak bagi pencapaian kemajuan suatu negara, demikian halnya dengan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Capaian Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan. sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sumberdaya manusia yang berkualitas. Capaian Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan.

**Grafik 1.13**  
**Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2023**





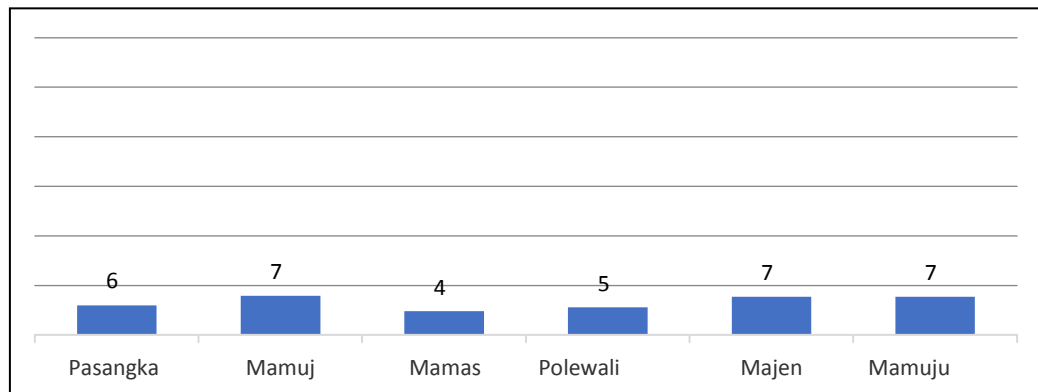
Peningkatan kualitas kesehatan penduduk telah diarahkan untuk memperbanyak dan memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, sarana kesehatan yang tersedia di Sulawesi Barat terdiri dari 10 Rumah Sakit yang terdiri dari 8 (Delapan) Rumah Sakit Pemerintah dan 2 (dua) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas yang ada di Sulawesi Barat sebanyak 98, Posyandu sebanyak 1.965. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah membangun Rumah Sakit Umum dengan kualifikasi Tipe B yang akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Rujukan di Sulawesi Barat dan sekitarnya.

Unsur kesehatan yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan diantaranya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2019, jumlah dokter di Sulawesi Barat tercatat sebanyak 317 orang, yang terdiri dari 227 dokter termasuk dokter spesialis dan 90 dokter gigi. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan lain yakni Bidan sebanyak 1.174 orang, perawat sebanyak 1.562 orang serta tenaga apoteker dan kefarmasian sebanyak 263 orang. Adapun rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

f. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru TBA Positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan menetapkan target CDR minimal pada tahun 2010 sebesar 70%. Dalam upaya peningkatan efektifitas pengendalian TB, Sulawesi Barat telah melakukan upaya penguatan DOTS yang merupakan kebijakan nasional dalam pengendalian Tuberkulosis. Kunci utama dalam DOTS yaitu: komitmen, diagnosis yang benar dan baik. Ketersediaan dan lancarnya distribusi obat, pengawasan penderita menelan obat dan pencatatan dan pelaporan penderita dengan baik dan benar dengan sistem kohort.

**Grafik 1.15**  
**Jumlah Baru TB BTA Positif Menurut Kabupaten**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023**



*Sumber : Dinkes Prov.Sulbar 2023*

**g. Angka Kejadian Malaria**

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kasus positif malaria terbesar di Indonesia pada tahun 2011 angka positif malariayang ada sebesar 3004 kasus yang merupakan angka yang cukup besar, namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menekan kasus Positif Malaria salah satunya melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2015, tentang eliminasi Malaria. Peraturan Gubernur ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Sulawesi Barat dalam upaya menghentikan penularan malaria di wilayah Sulawesi Barat yang meliputi kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa dan Majene. Melalui berbagai upaya tersebut sehingga dari tahun ke tahun kasuspositif malaria mengalami penurunan. Sejak tahun 2011 hingga pada tahun 2017 jumlah kasus positif malaria mengalami penurunan yang signifikan hingga sebesar 95 kasus. Hal ini tentunya sebuah pencapaian yang positif dalam menekan perkembangan kasus Positif Malaria yang ada.

**h. Kepesertaan Jaminan Kesehatan**

Salah satu bentuk upaya pemerintah saat ini dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu melalui kepesertaan jaminan kesehatan. Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan di Sulawesi Barat padaa tahun 2016 mencapai 63,49 persen mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 sebesar 82,83 persen. Hal ini diharapkan dapat dituntaskan sampai

dengan tahun 2022 sebesar 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan oleh nasional.

i. Akses Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2016 akses sanitasi layak sebesar 59,35 persen meningkat pada tahun 2019 sebesar 73,39 persen akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2020. Meskipun demikian namun angka tersebut masih tidak dapat ditingkatkan sesuai dengan target pemerintah pusat dalam RPJMN sebesar 100 persen pada tahun 2022.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciaptakarya, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.

1) Sub Urusan Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR meliputi:

- (a) Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
- (b) Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; dan
- (c) Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan

sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggung-jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

**Tabel 1.22**

**Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat**

<b>PROVINSI SULAWESI BARAT</b>	<b>Luas (ha)</b>
<b>Kabupaten Mamasa</b>	
DI. Aralle	2.330
DI. Mambi	2.728
DI. Messawa	1.562
DI. Pana	1.334
<b>PROVINSI SULAWESI BARAT</b>	<b>Luas (ha)</b>
DI. Rantebulahan Timur	1.400
DI. Tandukkalua	2.170
<b>Kabupaten Mamuju</b>	
DI. Papalang – Sampaga	2.245
<b>Kabupaten Mamuju Tengah</b>	
DI. Tobadak	1.880
<b>Kabupaten Pasangkayu</b>	
DI. Bantalaka	1.200
<b>Kabupaten Polewali Mandar</b>	
DI. Lakejo	1.265
DI. Tandung	1.000
<b>Sulawesi Barat 2016</b>	<b>19.114</b>

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 1.23**

**Jenis Irigasi di Sulawesi Barat tahun 2023**

Kabupaten	Jenis Lahan Sawah					
	Irigasi				Tadah Hujan	Jumlah
	Irigasi Teknis	Irigasi ½ Teknis	Irigasi Sederhana	Jumlah		
Majene	-	133	220	353	3.467	4.119
Polewali Mandar	12.396	1.255	880	14.531	5.813	20.972
Mamasa	-	1.300	12.717	14.017	2.711	14.947
Mamuju	-	659	7.095	7.754	8.596	17.338
Pasangkayu	-	900	775	1.675	4.383	6.219

Mamuju Tengah	-	0	500	500	12.990	14.929
Sulawesi Barat	<b>12.396</b>	<b>4.247</b>	<b>22.187</b>	<b>38.830</b>	<b>37.960</b>	<b>78.524</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat

Jumlah irigasi yang ada di Sulawesi Barat sebesar 38.380 ha yang terbagi atas irigasi teknis sebesar 12.396 yang hanya terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Irigasi ½ teknis sebesar 4.247 ha yang terbesar di Kabupaten Polewali Mandar serta Kabupaten Mamasa, Irigasi Sederhana sebesar 22.187 ha yang terbesar di Kabupaten Mamasa.

**Tabel 1.24**  
**Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**  
**Sub Bidang Sumber Daya Air**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
3	Pekerjaan Umum					
3,17	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	63,86	63,86	40,82	41,27	43,31
	- Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	14.416	15.858	18.270	18.470	19.470
	- Luas irigasi kabupaten (ha)	22.574	24.832	44.757	44.756,54	44.956,54

Sumber: Dinas PU Provinsi Sulawesi Barat 2023

## 2) Sub Urusan Keciaptakaryaan

Akses rumah tangga ke sumber air minum bersih seringkali menjadi indikator kesehatan masyarakat karena fungsi air itu sendiri yang merupakan kebutuhan pokok. Tahun 2020 akses terhadap air minum bersih telah dapat dinikmati oleh lebih dari dua pertiga penduduk Sulawesi Barat. Kondisi ini semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 1.25**  
**Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat, 2023**

Kabupaten	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan		Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung
Majene	10,95	9,62	37,72		10,95	3,94
Polewali Mandar	13,94	16,49	18,53		19,98	8,35
Mamasa	10,99	3,98	1,24		0,32	1,74
Mamuju	13,53	8,82	28,86		16,61	8,00
Pasangkayu	-	13,57	48,42		20,52	2,26
Mamuju Tengah	2,40	15,34	32,57		20,50	14,31
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>10,09</b>	<b>12,05</b>	<b>26,22</b>		<b>15,91</b>	<b>6,69</b>
Majene	18,43	0,79	7,61	-	-	100,00
Polewali Mandar	12,36	3,30	6,74	-	0,31	100,00

Mamasa	8,61	23,85	48,08	1,03	0,15	100,00
Mamuju	16,47	5,33	2,19	0,19	-	100,00
Pasangkayu	3,41	0,91	8,83	1,50	0,57	100,00
Mamuju Tengah	5,34	2,78	2,28	4,48	-	100,00
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>11,53</b>	<b>5,60</b>	<b>10,91</b>	<b>0,81</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

**Tabel 1.26**  
**Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat, 2023**

Kabupaten	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung
Majene	10,95	9,62	37,72	10,95	3,94
Polewali Mandar	13,94	16,49	18,53	19,98	8,35
Mamasa	10,99	3,98	1,24	0,32	1,74
Mamuju	13,53	8,82	28,86	16,61	8,00
Pasangkayu	-	13,57	48,42	20,52	2,26
Mamuju Tengah	2,40	15,34	32,57	20,50	14,31
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>10,09</b>	<b>12,05</b>	<b>26,22</b>	<b>15,91</b>	<b>6,69</b>

**Lanjutan Tabel diatas**

Kabupaten	Mata Air Terlindung	Mata Air tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Majene	18,43	0,79	7,61	-	-	100,00
Polewali Mandar	12,36	3,30	6,74	-	0,31	100,00
Mamasa	8,61	23,85	48,08	1,03	0,15	100,00
Mamuju	16,47	5,33	2,19	0,19	-	100,00
Pasangkayu	3,41	0,91	8,83	1,50	0,57	100,00
Mamuju Tengah	5,34	2,78	2,28	4,48	-	100,00
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>11,53</b>	<b>5,60</b>	<b>10,91</b>	<b>0,81</b>	<b>0,20</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

**Tabel 1.27**  
**Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten Dan Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat, Tahun 2023**

Kabupaten	Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada	Jumlah
Majene	68,65	9,22	8,14	0,29	13,70	100,00
Polewali Mandar	82,11	5,83	1,14	0,57	10,35	100,00
Mamasa	63,88	7,73	12,14	0,40	15,84	100,00
Mamuju	67,26	7,03	2,85	0,00	22,86	100,00
Pasangkayu	73,12	6,44	1,29	0,51	18,64	100,00
Mamuju Tengah	75,13	4,41	1,72	0,50	18,24	100,00
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>73,31</b>	<b>6,66</b>	<b>3,76</b>	<b>0,38</b>	<b>15,88</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

Selain ketersediaan air minum bersih, ketersediaan sanitasi layak juga dibutuhkan untuk memenuhi syarat rumah sehat. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat 63,48 persen rumah tangga memiliki jamban sendiri. Tahun 2020, rumah tangga pengguna jamban sendiri meningkat menjadi 73,31 persen. Kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat terjelaskan dengan semakin

banyaknya masyarakat yang memiliki jamban sendiri dan berkurangnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki jamban.

### 3) Sub Urusan Jalan

Dalam rangka menggerakkan perekonomian khususnya di Sulawesi Barat maka diperlukan penanganan infrastruktur yang berkelanjutan untuk itu kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah terutama infrastruktur dan konektivitas. Salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk segera mendapat penanganan yaitu jalan. Kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat pada akhir tahun 2020 dengan panjang 349,67 km, dimana terdapat 39,58 persen dalam kondisi mantap, dan 60,42 persen dalam kondisi tidak mantap.

**Tabel 1.28**  
**Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat (km),**

Kabupaten	Panjang Jalan/Kewangan			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Majene	103,30	110,21	621,20	834,71
Polewali Mandar	89,78	146,61	855,36	1 071,75
Mamasa	175,60	115,64	649,77	941,01
Mamuju	144,51	208,35	666,86	1 019,72
Pasangkayu	145,24	15,00	2 598,75	2 758,99
Mamuju Tengah	104,71	48,39	465,88	618,98
Sulawesi Barat	<b>763,17</b>	<b>644,20</b>	<b>5 837,81</b>	<b>7 245,15</b>

*Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2023*

Dari tabel diatas digambarkan kondisi jalan provinsi tahun 2022 dengan kondisi Mantap sebesar 37,24 persen. Kondisi mantap pada jalan provinsi meningkat menjadi 39,58 persen pada akhir tahun 2020. Hal itu menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan provinsi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Demikian sebaliknya dengan kondisi Jalan Tidak Mantap yang terus mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya persentase jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap. Penurunan tersebut berarti bahwa perbaikan jalan provinsi dari kondisi sedang beralih menjadi kondisi baik. Panjang jalan provinsi tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2016 yang disebabkan adanya ruas jalan provinsi yang telah ditetapkan menjadi jalan nasional yaitu ruas Polewali – Tabone – Malabo dan Ruas Salubatu – Mambi–Malabo – Mamasa – Batas Toraja Utara.

Adapun status jalan yang ada di Strategis Nasional yang juga masih menjadi kewenangan Provinsi.

**Tabel 1.29**  
**Ruas Jalan Provinsi (Kolektor Primer) Sulawesi Barat**

NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (Km)	KABUPATEN
Lama		Baru				
001	5	001	5	BATUISI – BATAS TORAJA	44,64	MAMUJU
003	1	002	1	LAMPA(MAPILLI) – MATANGNGA	45,68	POLMAN
003	2	002	2	MATANGNGA – KEPPE	31,10	POLMAN
004	1	003	1	SALUTAMBUNG – UREKANG	36,46	MAJENE
004	2	003	2	UREKANG – MAMBI	18,58	MAMASA
005	1	004	1	TIKKE - BTS SULTENG	9,50	PASANGKAYU
JUMLAH					185,96	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 1.30**  
**Kondisi Ruas Jalan Strategis Provinsi Sulawesi Barat**

No	Nama Ruas Jalan Strategis Provinsi	Kecamatan yang dilalui	Panjang ruas (Km)	Kondisi Jalan Akhir Tahun 2020				KET
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PIRIANG-MAPILLI	KEC. LAMPA	48,14	27,996	1	11,604	7,54	
2	TIBUNG-ALU	KEC. ALU	24,69	0	0,2	8	16,49	
3	ALU-TINAMBUNG	KEC. ALU	14,79	11,496	0	2,494	0,8	
4	SALEPPA-PUAWANG	KEC. SALEPPA	6,46	4	0	2,46	0	
5	PUAWANG-KATITTING	KEC. PUAWANG	6,85	3,967	0,853	2,03	0	
6	LOMBONGAN (TALAMBALAO) - PIRIANG	KEC. TIBUNG	27,29	3,3	1,5	1	21,49	
7	PALLANG PALLANG-TIBUNG	KEC. TIBUNG	13,5	2,15	2	4	5,35	
8	PAMBOANG-SUMARRANG	KEC. PAMBOANG	18,58	0	2	0	16,58	
9	SUMARRANG-GALUNG LOMBOK	KEC. SUMARRANG	14,38	5,07	2	5,88	1,43	
10	AKSES PELABUHAN PASANGKAYU	KEC. PASANGKAYU	5,5	0	0	3,1	2,4	
11	TABONE - NOSU	KEC. TABONE	27,5	7,445	0	0	20,06	
12	NOSU - PANA	KEC. NOSU	26,7	2,33	0	0	24,37	
13	PANA - MAMULLU - MANIPI BARRU	KEC. PANA	10	0	0	0	10	
14	AKSES BANDARA SUMARORONG	KEC. SUMARORONG	1,757	0,1	0	1,657	0	
15	TOBADAK (BENTENG) -TOBADAK VII	KEC. TOBADAK	21	14,74	0	6,26	0	
16	TOBADAK VII - TOBADAK VIII (BTS TOMMO)	KEC. TOBADAK	13,19	0	0	13,19	0	
17	AKSES PELABUHAN BUDONG-BUDONG	KEC. BUDONG-BUDONG	14,2	7,08	0	2	5,12	
JUMLAH PJG. JLN STRATEGIS PROVINSI			294,527	89,674	9,553	63,675	131,6	



**Tabel 1.31**  
**Ruas Jalan Strategis Nasional Provinsi Sulawesi Barat**

NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (Km)	KABUPATEN
Lama		Baru				
001	1	001	1	SALUBATU - BONEHAU	28,70	MAMUJU
001	2	001	2	BONEHAU - KALUMPANG	21,97	MAMUJU
001	4	001	3	KALUMPANG BATUISI	15,74	MAMUJU
		001	4	BATUISI - BTS LUWU UTARA	42,30	MAMUJU
		001	6	JL. MARTADINATA - SUMARE (RANGAS) - BTS. TAPALANG BARAT	55,00	MAMUJU
<b>JUMLAH</b>					<b>163,71</b>	

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2023*

Jalan merupakan parasarana angkutan darat yang paling penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Secara umum panjang jalan nasional di sulawesi barat tahun 2013 sekitar 602,78 km, dengan kondisi baik 453,34 km, kondisi sedang 144,86 km, kondisi rusak 3,88 km dan rusak berat 0,7 km.

**Tabel 1.32**  
**Panjang Jalan Provinsi di Sulawesi Barat tahun 2022 dan 2023**

RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2022	PANJANG	RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2023	PANJANG
Salubatu – Mambi - Mala'bo –Mamasa - Batas Tator	122,54	Salubatu – Bonehau - Kalumpang – Batuisi - Batas Luwu Utara	108,71
Salubatu – Bonehau - Kalumpang – Batas Luwu Utara	92,97	Martadinata - Sumare (Rangas) - BTS. Tapalang Barat	55
Kalumpang - Batuisi – BatasToraja	60.38	Batuisi – Batas Toraja	44,64
Polewali – Tabone – Mala'bo	71,89	Lampa – Matangnga - Keppe	76,78
Lampa – Matangnga - Keppe	76,78	Salutambung – Urekang - Mambi	55,04
Salutambung – Urekang -Mambi	55,04	Tikke - BTS. Sulteng	9.5
Tikke - BTS. Sulteng	8.5		
<b>TOTAL (Km)</b>	<b>488,10</b>	<b>TOTAL (Km)</b>	<b>349,67</b>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2023*

**Tabel 1.33**  
**Panjang Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2023**

NO	TAHUN	PANJANG (KM)
1	2012	3,600
2	2013	13,425
3	2014	12,400
4	2015	53,480
5	2016	14,740
6	2017	18,263
7	2018	13,965
8	2019	11,190
9	2020	9,700
<b>TOTAL</b>		<b>150,763</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 1.34**  
**Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jalan**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
3	Pekerjaan Umum					
3.9	Panjang jalan dilalui roda 4 (%)	0,38	0,39	0,39	0,25	0,29
	- Jumlah panjang jalan (km)	4.774	4.984	4.984	3.913,91	4.480,91
	- Jumlah penduduk (Orang)	1.258.090	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554
3,10	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)	NA	NA	91,06	91,06	91,37
	- Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	NA	NA	591	591	593
	- Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk	NA	NA	649	649	649
3,11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam) (%)	34,52	36,04	37,55	39,06	40,56
	- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	4.774	4.984	5.192	5.401	5.609
	- Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	13.828,71	13.828,71	13.828,71	13.828,71	13.828,71
3,12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	10,85	11,09	11,30	11,42	11,54
	- Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	1.500	1.534	1.562	1.579	1.596
	- Panjang seluruh jalan kabupaten (km)	13.828,71	13.828,71	13.828,71	13.828,71	13.828,71
3,13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	NA	NA	31,61	38,22	42,86

	- panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	NA	NA	263	318	378
	- Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (km)	NA	NA	832	832	882
<b>3,14</b>	<b>Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>38,29</b>	<b>42,07</b>	<b>43,94</b>
	- Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	NA	NA	152	167	192
	- Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	NA	NA	397	397	397
<b>3,16</b>	<b>Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)</b>	<b>NA</b>	<b>NA</b>	<b>8,57</b>	<b>14,29</b>	<b>25,71</b>
	- Jumlah lokasi Pembangunan turap di Umum wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	NA	NA	3	5	9
	- Jumlah saluran wilayah rawan longsor	NA	NA	35	35	35

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2023*

(d) Sub Urusan Jasa Konstruksi

Tabel 1.35

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jasa Konstruksi

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
3	Pekerjaan Umum					
3,3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)	0,27	0,27	0,27	0,23	0,23
	- Jumlah tempat ibadah (Buah)	3.390	3.434	3.538	3.538	3.541
	- Jumlah penduduk (Orang)	1.258.090	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554
3,5	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk (%)	NA	NA	54,90	51,85	54,47
	- Jumlah daya tampung tempat Umum pemakaman umum	NA	NA	732.356	799.584	843.571
	- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.258.090	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554
3.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	4,60	5,37	5,16	4,75	4,86
	- Jumlah daya tampung TPS	57.900,38	68.792,38	68.792,38	73.245,38	75.245,38
	- Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.258.090	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2023

(e) Sub Urusan Penataan Ruang

Tabel 1.36

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
5	Penataan Ruang					
5,1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB (%)	NA	NA	10,78	10,95	11,09
	Luas ruang terbuka hijau	NA	NA	71.322,73	72.522,73	73.472,73
	Luas wilayah ber HPL/HGB	NA	NA	661.801,73	662.051,73	662.401,73
5,2	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan (%)	NA	NA	41,46	42,82	44,42
	Jumlah bangunan ber - IMB	NA	NA	115.600	119.450	124.000
	Jumlah bangunan	NA	NA	278.824	278.949	279.174
5,3	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	NA	NA	0,06	0,07	0,07
	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)	NA	NA	20	23	25
	Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)	NA	NA	34.660	34.710	34.785
	Ketaatan terhadap RTRW					
	Luas wilayah produktif (ha)	NA	NA	655.562	655.689,56	655.892,93
	Luas wilayah Industri (ha)	NA	NA	NA		
	Luas wilayah banjir (ha)	NA	NA	5.084,44	5.186,13	5.186,13
	Luas wilayah Kekeringan (ha)	NA	NA	20.337,77	20.642,83	20.642,8
	Luas wilayah perkotaan (ha)	NA	NA	NA		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2023

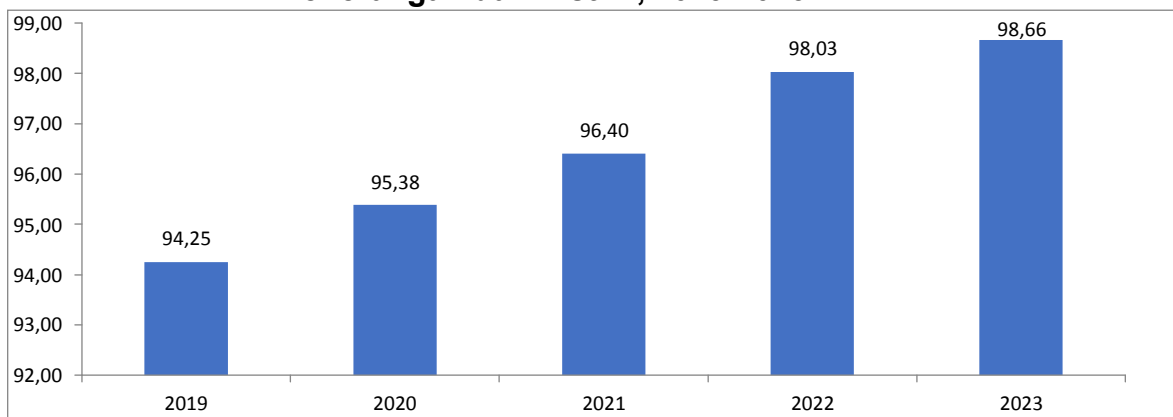
#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

**Tabel 1.37**  
**Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga Milik	Jumlah Rumah Tangga Milik	Backlog Kepemilikan Rumah
	(Jiwa)	(unit)	(%)	(unit)	(unit)
2019	1.258.090	280.926	91,31	256.502	24.424
2020	1.282.162	286.324	91,41	261.743	24.581
2021	1.306.478	292.792	91,00	266.446	26.346
2022	1.330.961	298.688	88,45	265.811	32.877
2023	1.355.554	304.600	86,85	264.545	40.055

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Grafik 1.38**  
**Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik, 2019-2023**

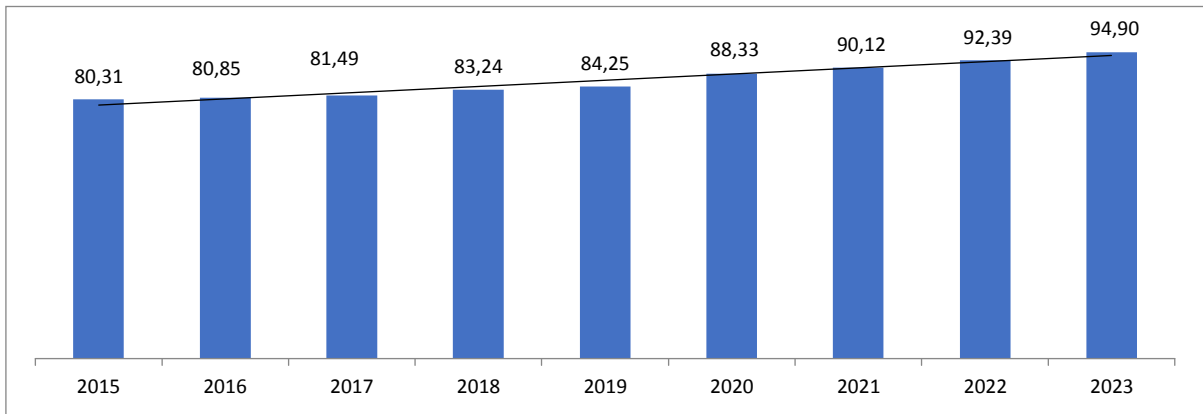


Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023

**Tabel 1.39**  
**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2023**

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	60,56	63,11	58,42	72,09	86,66
Polewali Mandar	67,91	66,10	71,09	82,44	79,63
Mamasa	32,87	34,63	40,15	51,24	26,00
Mamuju	58,89	60,95	59,70	68,39	80,70
Pasangkayu	62,43	62,47	75,04	75,92	75,93
Mamuju Tengah	60,60	58,56	63,36	79,95	72,05
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>59,35</b>	<b>59,48</b>	<b>63,21</b>	<b>73,39</b>	<b>72,75</b>

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2023



Sumber: Dinas Perkim Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023

**Tabel 1.39**  
**Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
3.7	Rasio rumah layak huni (Jiwa/Rumah)	0,167	0,198	0,202	0,209	0,211
	- Jumlah rumah layak huni (Rumah)	220.641	263.835	274.497	286.431	299.365
	- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.256	1.419.229
3.8	Rasio pemukiman layak huni (%)	NA	0,999481	0,999483		
	-Luas pemukiman layak huni (Ha)	NA	1.448.948	1.448.951		
	- Luas wilayah permukiman (Ha)	NA	1.449.700	1.449.700		
3,18	lingkungan pemukiman (%)	1,67				
	- Luas kawasan kumuh (ha)	5.276	752	752	750	748
	- Luas wilayah (ha)	316.338	16.973	16.973	16.973	16.973

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2023

## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

**Tabel 1.40**  
**Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2023**

Kabupaten	Tahun 2022		Tahun 2023	
	Jumlah (Orang)	Rasio	Jumlah (Orang)	Rasio
Majene	990	58,55	1.274	73,09
Polewali Mandar	1.595	36,86	2.458	47,12
Mamasa	1.071	68,23	1.172	56,85
Mamuju	1.231	44,06	1.514	50,11
Pasangkayu	542	32,80	790	37,28
Mamuju Tengah	367	28,76	700	48,02
<b>Total</b>	<b>5.792</b>		<b>7.908</b>	

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Polisi Pamong Praja	160	148	143	137	137
Jumlah Penduduk	1.282.162	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.419.229
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 1.42 Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Diklat Satpol PP	71	0	0	0	30

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tidak ada tenaga Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar di sebabkan karena tidak adanya Penganggaran di Kantor Satpol PP.

**Tabel 1.43**

**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3  
(Ketertiban, Kententraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	12	15	20	22	25
Jumlah Pelanggaran K3	127	120	125	124	129
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	9.44 %	100 %	34 %	100 %	91 %

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 1.44  
Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Demo Bidang Politik	2	3	5	7	9
Jumlah Demo Ekonomi	1	3	6	5	2
Jumlah Kasus Pemogokan Kerja	3	4	7	6	4
Jumlah Demo Unjuk Rasa	5	6	12	6	4
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>34</b>	<b>29</b>

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2023

**Tabel 145  
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP**

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Barat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2023

## 6. Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Permasalahan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam konteks inilah sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis dalam pembangunan nasional.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



Hal ini diharapkan guna meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial setempat serta lingkungannya.

**Tabel 1.46**  
**Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial**  
**DiProvinsi Sulawesi Barat**

NO	DATA PMKS	POPULASI DATA PMKS TAHUN 2016	HASIL YANG TERTANGANI				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Balita Terlantar	1.900 Jiwa	N/A	32	N/A	56	56
2	Anak Terlantar	8.803 Jiwa	5.180	165	882	1390	1390
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	153 Jiwa	N/A	25	50	3	N/A
4	Anak Jalanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Anak Dengan Kedisabilitas	2.667 Jiwa	8	3	N/A	100	N/A
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	138 Jiwa	N/A	N/A	2	N/A	N/A
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	10.846 Jiwa	N/A	N/A	N/A	2	104
8	Lanjut Usia Terlantar	7.986 Jiwa	460	1015	100	500	500
9	Penyandang Disabilitas	2.152 Jiwa	280	198	279	120	160
10	Tuna Susila	2100 Jiwa	20	N/A	20	13	N/A
11	Pengemis	559 Jiwa	N/A	N/A	N/A	11	N/A
12	Gelandangan	33 Jiwa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Pemulung	283 Jiwa	N/A	N/A	N/A	10	N/A
14	Kelompok Minoritas	77.927	N/A	N/A	N/A	20	N/A
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	18.903 Jiwa	25	20	100	50	N/A
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	755 KK	N/A	N/A	N/A	50	N/A
17	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	4.280 Jiwa	N/A	N/A	N/A	6	N/A
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	7.214 Jiwa	18	10	90	20	N/A
19	Korban Trafficking	217 Jiwa	N/A	N/A	N/A	20	N/A
20	Korban Tindak Kekerasan	150 Jiwa	N/A	20	15	10	N/A
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2020 Jiwa	18	8	50	50	N/A
22	Korban Bencana Alam	29000 Jiwa	1607	2340	5029	200	13000
23	Korban Bencana Sosial	1.537 Jiwa	1061	1800	124	253	700
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	6880 Jiwa	160	60	N/A	100	N/A
25	Fakir Miskin	140,761 KK	8154	28398	23.989	200	1860
26	Komunitas Adat Terpencil	12.628 KK	159	50	223	50	66

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2023

Ket : 1) Anak Gelandangan dan pengemis yang ada di Sulbar merupakan anak gelandangan dan pengemis dari luar Sulbar. 2) Untuk Keterangan N/A format diatas tidak ada anggaran.

**I. Tabel 2.84 Data potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, 2023**

NO	DATA PSKS	JUMLAH PSKS PER KABUPATEN						TOTAL PSKS
		POLMAN	MAJENE	MAMUJU	MAMASA	MATENG	MATRA	
1	Pekerja Sosial Profesional	1	1	6	1	1	1	11
2	Pekerja Sosial Masyarakat	41	96	32	62	10	13	254
3	Taruna Siaga Bencana	60	57	66	189	49	58	479
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial							
	- LKS Tuna Sosial	1	1	3	1	1	1	8
	- LKS Anak	15	9	11	7	1	2	45
	- LKS Lanjut Usia	1	1	1	1	1	1	6
	- LKS Orang Dengan Kecacatan (ODK)	6	5	2	2	1	5	21
	- LKS Rehabilitasi Narkotika dan Fsitrofik dan Zat Adektif (NAPZA)	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1
	LK Askesos	3	7	5	2	1	1	19
5	Karang Taruna	98	32	120	102	15	30	397
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	N/A	1	1	5
7	Keluarga Pioner	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	5	5	10	N/A	N/A	N/A	20
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	5	5	25	1	5	1	42
10	Penyuluh Sosial	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	80
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	16	8	11	17	5	12	69
12	Dunia Usaha (DU) yang berpartisipasi dalam CSR)	65	10	75	20	25	39	234

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

**Tabel 2.85**  
**Capaian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial**  
**di Sulawesi Barat tahun 2019-2023**

No	Indikator SPM	Capaian 2019		Capaian 2020		Capaian 2021		Capaian 2022		Capaian 2023	
		Juml.	%	Juml.	%	Juml.	%	Juml.	%	Juml.	%
1	Persentase (%) PMKS skala Provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{37.66}{666.86}$	5,6	$\frac{41.454}{666.864}$	6,2	$\frac{43.248}{666.864}$	6,5	$\frac{45.321}{666.864}$	6,8	$\frac{47.465}{666.864}$	7,1
2	Persentase (%) Panti sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56

3	Persentase (%) Panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48
4	Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial diluar panti	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7
5	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{6}$	83,33	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{3}{6}$	50
6	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{6}$	83,33	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{3}{6}$	50
7	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jaminan sosial penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{6}$	83,33	$\frac{5}{6}$	83,33

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2023

## 7. Tenaga Kerja

- Kurangnya lapangan kerja, terlihat dari tingginya pencari Kerja Terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 3.318, sedangkan lowongan kerja terdaftar sebanyak 543, penempatan atau pemenuhan tenaga kerja sebanyak 1.372.
- Rendahnya Kualitas tenaga kerja terlihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja yang ditamatkan masih di dominasi SMP ke bawah yaitu sebanyak 412.430 jiwa atau 62,83 persen, selanjutnya untuk SMA dan SMK 150.440 jiwa atau 22,92 persen, dan yang memiliki Pendidikan Tinggi yaitu Diploma dan Universitas 93.510 jiwa atau 14,25 persen pada tahun 2020.

## 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kurangnya pemahaman konsep gender, PUG dan penerapan Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Barat;

- b. Kurangnya pemahaman tentang three ends (kekerasan perempuan dan anak, perdagangan orang (human trafficking) dan kesenjangan ekonomi);
- c. Masih tingginya jumlah pekerja usia anak. Jumlah pekerja usia anak pada tahun 2020 mencapai 5,28 persen dibandingkan pada tahun 2019 3,46 persen;
- d. Tingginya pernikahan usia anak di Sulawesi Barat berada pada urutan ke tiga secara nasional di tahun 2023;
- e. Tingginya angka kekerasan terhadap ibu dan anak. Pada tahun 2016 jumlah korban KDRT sebanyak 126 kasus meningkat di tahun 2017 sebanyak 177 kasus;
- f. Belum maksimalnya penanganan anak perlindungan khusus;
- g. Belum optimalnya wadah P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) dalam menanggulangi kasus.

#### 9. Pangan

- a) Pangan belum terdistribusikan dengan baik;
- b) Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan;
- c) Masih terdapatnya daerah rawan pangan.
- d) Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah Daerah.
- e) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.
- f) Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar dan bermutu.

#### 10. Lingkungan Hidup

- a) Masih banyaknya lahan kritis, kerusakan hutan dan sumber-sumber air.
- b) Banyaknya kerusakan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c) Tingginya pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah;
- d) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- e) Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

#### 11. Pertanahan

- a) Banyaknya lahan yang belum bersertifikat. Persentase luas lahan yang bersertifikat hanya sebesar 25,27 persen dari luas APL;
- b) Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah;

- c) Tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat dengan perusahaan;
- d) Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T);

#### 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) Belum optimalnya pengendalian penduduk;
- c) Belum optimalnya akses data kependudukan dan pencatatan sipil;
- d) Tingginya penduduk rentan administrasi kependudukan;

#### 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat desa;
- b) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa;
- c) Belum optimalnya pembinaan pranata sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- d) Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna.

#### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Belum maksimal cakupan layanan KB;
- b) Belum optimalnya ketahanan keluarga;
- c) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja;
- d) Kurangnya intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;

#### 15. Perhubungan

- a) Belum berkembangnya sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan;
- b) Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi laut;
- c) Masih rendahnya kualitas pelayanan umum baik di bidang angkutan darat maupun angkutan sungai dan penyeberangan;
- d) Belum optimalnya bandara dan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.

#### 16. Komunikasi dan Informatika

- a) Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah;
- b) Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi;
- c) Belum optimalnya penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah;

- d) Belum optimalnya layanan e-Government secara holistik dan dikelolanya data sebagai aset strategis.

#### 17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Keterbatasan SDM Pelaku Koperasi dan Pelaku Usaha.
- b) Rendahnya Ketersediaan data valid koperasi dan UKM.
- c) Lemahnya Informasi, akses pasar dan Pembiayaan untuk pengembangan usaha.
- d) Rendahnya akses dan fasilitasi pembinaan Koperasi dan UMKM secara digital.
- e) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) belum berjalan secara optimal.

#### 18. Penanaman Modal

- a) Belum optimalnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui PTSP dikarenakan Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan bidang perizinan.
- b) Terbatasnya SDM yang memahami dengan baik konsep pelayanan perizinan, kebijakan terkait sistem prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
- c) Iklim investasi yang belum kondusif karena sejumlah faktor antara lain kondisi infrastruktur dasar, penerapan regulasi terkait kemudahan berusaha berbasis resiko;
- d) Tidak maksimalnya pelaksanaan promosi diakibatkan oleh kurang updatenya data potensi sektor prioritas;
- e) Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN;

#### 19. Kepemudaan dan Olahraga

- a) Minimnya kegiatan pengembangan potensi dan partisipasi pemuda;
- b) Rendahnya kemampuan pemuda untuk berwirausaha;
- c) Tingginya trend dekadensi moral terkait pornografi, porno aksi dan narkoba;
- d) Minimnya pembibitan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;
- e) Minimnya kualitas dan kuantitas pelatih di bidang olahraga prestasi;
- f) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga;
- g) Minimnya kejuaraan olahraga prestasi untuk kelompok umur.

#### 20. Statistik

- a) Belum maksimalnya pelaksanaan satu data,

- b) Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang update dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- c) Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan di Sulawesi Barat.

#### 21. Persandian

- a) Belum maksimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik.
- b) Belum optimalnya penerapan tanda tangan digital.

#### 22. Kebudayaan

- a) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
- b) Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
- c) Masih rendahnya promosi budaya lokal.
- d) Rendahnya minat generasi muda untuk mengelola dan melestarikan kekayaan budaya dan kearifan lokal.

#### 23. Perpustakaan

- a) Minat baca masyarakat masih rendah, ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah yang semakin menurun, ini dikarenakan masyarakat sekarang cenderung lebih berminat membaca lewat HP/Internet daripada membaca langsung di Perpustakaan Daerah.
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana.
- c) Kurangnya tenaga fungsional pustakawan.
- d) Kurangnya koleksi judul buku menjadikan minimnya literasi yang dapat diakses.

#### 24. Kearsipan

- a) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- b) Belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis;
- c) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan.

### **3) Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### 1. Kelautan dan Perikanan

- a) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan Budidaya;
- c) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan;
- d) Belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan;
- e) Kurangnya penganekaragaman produk olahan berbahan baku ikan.

- f) Sistem rantai dingin belum optimal;
- g) Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi berbasis pendekatan spasial / kawasan;
- h) Tingginya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i) Minimnya kualitas sumberdaya manusia baik ASN perikanan maupun stakeholder perikanan dan kelautan.

## 2. Pariwisata

- a) Belum optimalnya promosi pariwisata berbasis teknologi informasi.
- b) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum multi stakeholders;
- c) Belum optimalnya fasilitas pendukung kepariwisataan;
- d) Belum meluasnya pemahaman sadar wisata pada masyarakat lokal.
- e) Masih kurangnya investasi sektor pariwisata.

## 3. Pertanian

- a) Masih rendahnya ketersediaan benih bermutu;
- b) Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
- c) Masih terbatasnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Pertanian;
- d) Terbatasnya sarana dan prasarana produksi peternakan;
- e) Terbatasnya petugas kesehatan hewan;
- f) Masih rendahnya penerapan teknologi budidaya, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- g) Masih rendahnya kemitraan usaha pertanian dengan pelaku agribisnis, baik pada usaha hulu (budidaya) maupun usaha hilir (pengolahan dan pemasaran).
- h) Laju alih fungsi lahan yang terus meningkat.
- i) Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian.

## 4. Kehutanan

- a) Masih terdapat lahan kritis di luar kawasan hutan;
- b) Belum efektifnya pengelolaan hutan lestari mendukung perekonomian daerah.
- c) Belum optimalnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB.
- d) Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan baik karena konflik tenurial kawasan hutan, pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan.



- e) Sarana prasarana operasional kesatuan pengelolaan hutan yang belum memadai.
- f) Masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia, kelompok tani hutan, kelompok usaha perhutanan sosial dalam mengelola potensi hutan.
- g) Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- h) Belum optimalnya Pelestarian dan Perlindungan sumberdaya alam hayati.

#### 5. Energi dan Sumberdaya Mineral

- a) Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
- b) Rasio elektrifikasi belum mencapai 100 persen dan masih rendahnya rasio desa berlistrik;
- c) Belum optimalnya pemanfaatan air bawah tanah;
- d) Maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI).

#### 6. Perdagangan

- a) Minimnya Infrastruktur ekspor impor di daerah.
- b) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi.
- c) Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian Mutu Barang.
- d) Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan.

#### 7. Perindustrian

- a) Masih rendahnya daya saing industri;
- b) Belum Optimalnya Pengolahan Bahan Baku Lokal;
- c) Belum Optimalnya Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
- d) Validitas data Industri Kecil Menengah Masih Rendah.
- e) Kurangnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pengembangan SDM pembina industri.

#### 8. Transmigrasi

- a) Masih terdapat lokasi transmigrasi yang belum clean and clear;
- b) Infrastruktur transportasi di lokasi transmigrasi kurang memadai;
- c) Kurangnya akses pemasaran produk hasil transmigrasi;
- d) Belum tersedianya perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- e) Rendahnya kualitas infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum lokasi transmigrasi.

### **3) Unsur Pemerintahan Umum**

- a) Kesatuan Bangsa dan Politik
  - a) Tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu belum optimal.
  - b) Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dalam pembangunan.
  - c) Masih belum optimalnya peran masyarakat dalam upaya deteksi dan cegah dini potensi permasalahan di daerah.

### **5) Unsur Penunjang**

#### **1. Perencanaan**

- a) Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah;
- b) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana.
- c) Usulan prioritas masyarakat melalui musrenbang belum terakomodir secara optimal dalam dokumen perencanaan.
- d) Basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kurang tersedia.

#### **2. Keuangan**

- a) Laporan pertanggungjawaban keuangan terkadang masih belum tepat waktu;
- b) Belum optimalnya pemahaman dan pengetahuan para bendahara OPD terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan;
- c) Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah;
- d) Belum sepenuhnya bendahara bersertifikat dalam penatausahaan keuangan;
- e) Belum optimal pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi BMD.

#### **3. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan**

- a) Kinerja aparatur perlu ditingkatkan;
- b) Belum optimalnya pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;
- c) Belum terpenuhinya kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
- d) Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja sebagai bahan analisis dan menentukan beberapa kebutuhan pegawai tiap OPD;

- e) Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan kediklatan.

#### 4. Penelitian dan Pengembangan

- a) Kurangnya desiminasi hasil kelitbangan kepada stakeholders;
- b) Belum optimalnya pengembangan SIDA;
- c) Masih minimnya pengembangan SDM bidang kelitbangan;
- d) Belum adanya pejabat fungsional peneliti di OPD terkait.

### 6) Unsur Pendukung

#### 1. Sekretariat Daerah

- a. Rendahnya ketersediaan dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa.
- b. Belum optimalnya Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yaitu baru mencapai B pada tahun 2020.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap regulasi di daerah.
- e. Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan implementasi kerjasama daerah.

#### 2. Sekretariat DPRD

- a. Program kerja DPRD telah tersusun dan terintegrasi dalam melaksanakan fungsinya, namun koordinasi antar eksekutif dan legislatif kadang belum berjalan dengan baik.

### 7) Unsur Pengawasan

#### 1. Inspektorat

- a) Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di beberapa OPD.
- b) Kurangnya kepedulian perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

## c. Visi Misi Kepala Daerah

### 1) Visi

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi suatu sistem perencanaan yang sistematis menggambarkan pola hubungan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kebijakan pembangunan nasional menjadi acuan bagi daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan nasional. Di samping itu konsistensi antara kebijakan (dokumen) perencanaan menjadi suatu hal yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025 telah ditetapkan bahwa pada periode RPJMD III (2017-2022) pencapaian kesejahteraan ekonomi, kemajuan daerah serta keunggulan dan kemartabatan manusia dan masyarakat Sulawesi Barat semakin dimantapkan melalui respons yang lebih kreatif oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan pondasi dan percepatan pembangunan yang telah dicapai pada periode RPJMD sebelumnya. Hal tersebut perlu ditanggapi sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang strategis yang semakin dinamis.

Periodisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tidak sinergi dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, menyebabkan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 erada pada dua periode RPJMD yakni periode III dan IV yang mana pada periode RPJMD IV 2020-2025 kesejahteraan

Masyarakat, keunggulan daerah dan keunggulan serta kemartabatan manusia Sulawesi Barat semakin dimatangkan dengan berlandaskan pada pencapaian RPJMD sebelumnya.

Perumusan Perencanaan Daerah tentunya tidak terlepas keterkaitan antara dokumen perencanaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri agar dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 1.7**

<b>RPJMN 2017-2022</b>	<b>RPJPD 2005-2025</b>
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Trwujudnya Sulawesi Barat yang Sejahtera, Maju dan Malaqbi
Keywords	Keywords

1. Berdaulat	1. Sejahtera
2. Mandiri	2. Maju dan
3. Berkepribadian	3. Malaqbi

Dengan memperhatikan keterkaitan visi pembangunan tersebut di atas serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dan isu-isu strategis yang terjadi di Sulawesi Barat maka ditetapkan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 yaitu :

***“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi”***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sulawesi Barat Maju: Komitmen untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat yang sejajar dengan Provinsi lainnya yang didukung oleh konektivitas wilayah dan daya saing yang tinggi serta berorientasi pada lingkungan.

Sulawesi Barat Malaqbi: Komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan kearifan lokal dengan dukungan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan religius.

Rumusan visi tersebut menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan periode RPJMD tahun 2017-2022 nantinya yang dilaksanakan yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan dan rumusan kebijakan berupa misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan sampai kepada program dan kegiatan.

## 2) Misi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dijelaskan bahwa misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD tahun lalu, kendala dan permasalahan yang dihadapi menjadi isu strategis pembangunan untuk masuk dalam agenda pembangunan pada periode RPJMD 2017-2022.

Hal tersebut didukung oleh arah pembangunan daerah periode RPJMD III (2015-2020) sebagaimana tertuang dalam RPJPD provinsi Sulawesi Barat tahun

2005-2025 yang menekankan pada pemantapan pencapaian kesejahteraan ekonomi, kemajuan daerah serta keunggulan dan kemartabatan manusia dan masyarakat Sulawesi Barat.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan sebagai berikut :

- Misi Pertama : Membangunan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian dan berbudaya.
- Misi Kedua : Mewujudkan pemerintahan yang bersih modern dan terpercaya
- Misi Ketiga : Membangunan dan menguatkan konektivitas antara wilayah berbasis unggulan strategis.
- Misi Keempat : Meingkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.
- Misi Kelima : Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 1.8**

**Penjelasan Misi Pembangunan Daerah 2017-2022**

No.	POKOK VISI	MISI	PENJELASAN MISI
1	Malaqbi	Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, berkepribadian dan berbudaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.</li> <li>2. Alam dan lingkungan yang terkelolah dengan baik dan profesional untuk kesejahteraan rakyat.</li> <li>3. Dalam hubungan dunia luar dan provinsi lainnya dalam jejaringnya kuat dan dihormati sehingga dipercaya dengan tujuan untuk membangun Sulawesi Barat yang lebih maju.</li> </ol>
2.	Malaqbi	Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi pemerintahan dimana pelaku yang terlibat didalamnya menjaga diri dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antara skala usaha berbasis ekonomi, pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, meyerap banyak tenaga kerja serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.</li> <li>2. Masyarakat dan pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan, berbudaya dan</li> </ol>

			religius. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3	Maju	Membangunan dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis	1. Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu terdapat tiga prinsip konsep konektivitas yaitu : 2. Memaksimalkan pertumbuhan me-lalui kesatuan kawasan (bukan keseragaman) dengan menghubungkan pusat pertumbuhan. 3. Memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang meghubungkan hinterland dan yang tetinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. 4. Mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar sehingga diperoleh manfaat pembangunan.
4.	Maju	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan berdaya Saing Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi yang digerakkan oleh Inovasi yang dapat menciptakan efesiensi dan efektivitas agar berdaya saing tinggi. Peningkatan Output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat. Pembangunan ekonomi yang diinginkan adalah kenaikan outpu yang disebabkan oleh adanya perbaikan dalam arti luas, sepeti adanya penemuan produk baru ataupun penemuan pasar baru.
5.	Maju	Mendorong pengrusutamaan Lingkungan Hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Isu Lingkungan Hidup menjadi Issu utama untuk memastikan terlaksananya pembangunan secara berkelanjutan yang mencakup integrasi antar aspek biofisik, aspek sosial dan aspek ekonomi dalam mendukung penghidupan yang berkelanjutan.

### 3) Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka perlu adanya kerangka yang jelas pda setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel 2.3 sebaga berikut.

**Tabel 1.9**

#### **Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Masing-Masing Misi**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017)	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1. Membangunan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian dan berbudaya</b>								
Meningkatkan Kualitas SDM yang terdidik, sehat dan	1. Meningkatnya Derajat Pendidikan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi.	IPM	64,80	66,62	67,64	68,65	69,68	70,53

berbudaya	2. Meningkatnya derajat kesehatan dalam mewujudkan kualitas manusia yang tinggi							
	2. Berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya , tertib dan tenteram.	Angka Krimina- litas	15,35	14,61	13,84	13,04	12,22	11,36
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih modern dan terpercaya								
Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabe dan modern							
	2. Meningkatnya kualitas kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya							
Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2017	2018	2019	2020	2021	2022
3. Membangunan dan menguatkan konektivitas antara wilayah berbasis unggulan strategis								
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mendorong produktivitas wilayah dan konektivitas antar wilayah	1. Meningkatnya kapasitas Infrastruktur dalam menunjang perekonomian daerah, mobilitas penduduk, serta pemukiman dan perumahan	Kondisi Mantap jalan Provinsi (%)	31,00	44,95	60	74,00	90,57	95,20
		Rasio Elktрифikasi (Angka Rasio)	86	88	90	92	94	96
	2.Meningkatnya konektivitas antar wilayah pulau kecil dengan daratan utama dan antar desa dengan kota dalam mengurangi disparitas wiayah.	Rumah Layak Huni (%)	84,25	87	90	95	95	97
		Persentase Daerah tertinggl (%)	80	72	61	54	46	30
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi								
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan peningkatan daya saing berbasis ekonomi lokal	1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,03	7,1-7,4	7,3-7,6	7,8-8,1	7,9-8,2	8,0-8,3
	2. Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Angka kemiskinan (%)	10,47	10,19	9,91	9,62	9,34	9,06
		Peringkat daya saing daerah (%)	30	27	25	23	20	18
5. Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan								
Mememlihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam	Terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	Indeks kajian lingkungan hidup daerah	69	70	71	72	73	75
	Terwujudnya pelestarian fungsi hutan							
	Terwujudnya pemantapan kawasan hutan	Luas lahan kritis	353.410	349.725	344.988	340.104	335.041	330.768

#### a. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah



Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 4 (empat) Tahun 2023-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

## **1. Strategi**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan per tahunnya yang akan dilaksanakan selama empat tahun kedepan maka perlu ditetapkannya strategi dan arah kebijakan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perumusan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan masing-masing organisasi perangkat daerah. Adapun pilihan

strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat.meliputi :

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kinerja pemerintah daerah gar mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan serta Arah memberdayakan segenap warga masyarakat Sulawesi Barat.
- b. Meningkatkan kualitas dan kapaitas sumber daya manusia yang berbudaya, produktif serta berintegritas.
- c. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat.
- d. Mendorong dan menfasiiitasi jalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah dengan memperhatikan potensi masing-masing wilayah yang didukung oleh infastruktur yang memadai.

Strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan Sulawesi Barat 2017-2022 dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat bahwa pembangunan Sulawesi Barat adalah pembangunan untuk semua tanpa kecuali yang secara implisit di dalamnya mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata.

## **2. Arah Kebijakan**

Perumusan arah kebijakan bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Penyusunan arah kebijakan diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan sumber daya serta kearifan lokal yang ada, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang efesien, efektif dan berhasil guna.

Arah kebijakan disusun yang disesuaikan dengan target dan pencapaian visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat maju dan malaqbi yang dijabarkan kedalam misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2023-2026 yaitu :

- a. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian dan berbudaya.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya.
- c. Membangun dan menguatkan konektivitas antara wilayah berbasis unggulan strategi.
- d. Membangun dan menguatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.
- e. Mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Untuk mencapai target indikator kinerja misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan masing-masing organisasi perangkat daerah.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.10**  
**Arah Kebijakan Pembangunan**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2027**

<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2026</b>	<b>Tahun 2027</b>
Peningkatan Kesejahteraan dan Produktivitas Wilayah	Membangun infrastruktur dan iklim investasi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing daerah	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk pembangunan yang berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang maju dan Malaqbi

### 3. Prioritas Daerah

Program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dijabarkan kedalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan,

dan Penunjang Urusan sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **4. Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat dan pemerintahan.

SPM disusun sebagai alat pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam teknis penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

SPM yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah. Hal ini sesuai berdasarkan amanat Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mendefinisikan SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian kewenangan, yaitu SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. ketersediaan, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
- c. keterjangkauan, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap Warga Negara;
- d. kesinambungan, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus-menerus;
- e. keterukuran, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara; dan
- f. ketepatan sasaran, yaitu SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada Warga Negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 menyebutkan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Penerapan SPM di Daerah dilaporkan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penerapan SPM tersebut termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM disusun sebagai alat pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata. SPM ini ditetapkan oleh Pemerintah diberlakukan untuk seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam teknis penyusunannya, SPM harus bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/prt/M/2018 tentang Standar Pelayanan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM Perumahan Rakyat terdiri atas : Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, Penerima Pelayanan dasar. Sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor

lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar hukum yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Povinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat



Nomor 39 );

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 / 368 / SULBAR/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Alam Banjir dan Longsor di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022;

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Mengingat RPJP Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan terkait lainnya, maka penentuan arah umum pembangunan jangka panjang, peran sub-wilayah, dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJP Provinsi Sulawesi Barat. Arah umum pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005–2025 secara umum diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah, yaitu “**Masyarakat Yang**

***Sejahtera, Daerah Yang Maju, Dan Manusia Yang Malaqbi”.***

- Pembangunan masyarakat yang sejahtera diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu:
  1. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha,
  2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan per-kapita dan menurunnya jumlah penduduk miskin. akses terhadap sumberdaya, dan rasa aman.
- Pembangunan daerah yang maju diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
  1. Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah, yang ditandai oleh meningkatnya penyediaan pelayanan infrastruktur (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dan antar sektor, dan distribusi pendapatan secara merata.
  2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai oleh menurunnya eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan, terciptanya pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dan berkembangnya pariwisata.
  3. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis, yang ditandai oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas KKN, serta kehidupan masyarakat yang bebas konflik (vertikal dan horizontal).
- Pembangunan manusia yang malaqbi diarahkan untuk mencapai sasaran sasaran pokok sebagai berikut:
  1. Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya luhur; terlestarikannya secara dinamis nilai-nilai, norma-norma dan kearifan local serta mengembangkan seni-budaya lokal dibalik modernisasi dan globalisasi; berkembangnya kehidupan beragama dan harmoni social serta kesatuan dan persatuan dibalik heterogenitas sosial dan multietnik masyarakat;

terlestarikannya lingkungan hidup yang indah dan asri; serta semakin mantapnya kepatuhan terhadap hukum.

2. Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berdaya saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi; angka harapan hidup minimal sama dengan rata-rata nasional; kualitas proses dan output pendidikan minimal sama dengan rata-rata nasional; dan kemampuan swadaya dan prakarsa masyarakat serta keberdayaan perempuan yang tinggi.